

**STRATEGI PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA DALAM
PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS*
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Kasus di Kabupaten Bireuen 2024)**

SKRIPSI



Oleh :

JAFAR SYAHPUTRA

NIM. 190801042

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026 /1447H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Jafar Syahputra
NIM : 190801042
Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen/16 Mei 2000
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : STRATEGI PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA
DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY
POLITICS* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi kasus Kabupaten Bireuen 2024)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 16 Mei 2026

Yang menyatakan,



Jafar Syahputra

NIM. 190801042

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**“ Strategi Partai Politik Golongan Karya dalam Pencegahan Praktik
Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah
(Studi Kasus Kabupaten Bireuen 2024)”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Politik

Disusun Oleh :

JAFAR SYAHPUTRA

NIM : 190801042

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing I



Eka Januar, M.Sos.Sc.

Nip : 198401012015031003

**STRATEGI PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA DALAM
PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen 2024)**

SKRIPSI

JAFAR SYAHPUTRA

Nim. 190801042

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Senin, 6 juli 2026 M
21 Muharram 1448 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

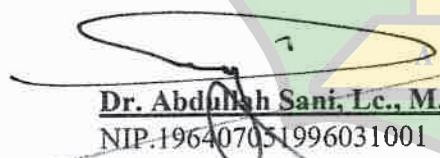
Ketua,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

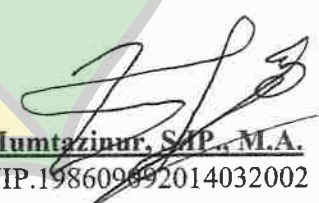
Sekretaris,


Syafiyur Rahman, S.A.P.

Penguji I,


Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A.
NIP.196407051996031001

Penguji II,


Mumtazinnur, S.P., M.A.
NIP.198609092014032002

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740327199931005

ABSTRAK

Nama : Jafar Syahputra
Nim : 190801042
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Partai Politik Golongan Karya dalam Pencegahan Praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen 2024)
Pembimbing I : Eka Januar, M.Sos.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pengurus dan kader Partai Golkar Kabupaten Bireuen serta masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Golkar Kabupaten Bireuen menerapkan strategi pencegahan Money Politics melalui perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi sebagaimana dikemukakan oleh Peter Schroder. Strategi tersebut dilakukan melalui pendidikan politik, pengawasan internal terhadap kader dan tim pemenangan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan strategi masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya politik masyarakat yang permisif terhadap politik uang, kondisi ekonomi masyarakat, tingginya persaingan politik, dan keterbatasan pengawasan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan praktik Money Politics memerlukan kerja sama antara partai politik, masyarakat, penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawas untuk mewujudkan demokrasi lokal yang jujur dan berintegritas.

Kata Kunci : *Strategi Politik, Partai Golkar, Money Politics, Pilkada, Demokrasi Lokal.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “STRATEGI PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen 2024)”. Kemudian tak lupa pula shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman Jahiliah ke zaman yang dipenuhi akan perkembangan teknologi seperti saat ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pelaksanaan penulisan Skripsi ini, tidak terlepas dari ilmu dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Ramzi Murziqin, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Eka Januar, M.Sos.Sc. sebagai dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan juga membimbing serta saran dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak Arif Akbar, M.A., selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan mata kuliah Seminar Penelitian yang telah memberikan arahan serta saran dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan serta saran dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Politik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Terkhusus orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada Rifqa Kharita Phonna, S.H selaku *support system* yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin .

Banda Aceh, 16 Mei 2026

Penulis

Jafar Syahputra

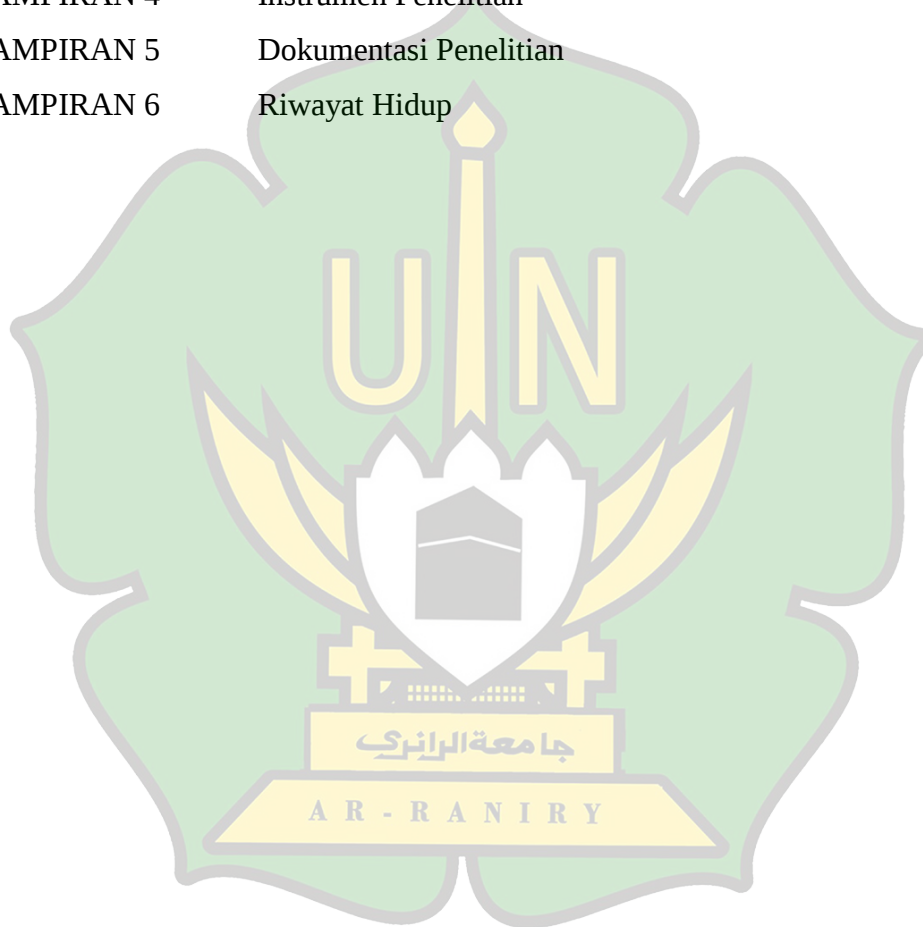
DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian Terdahulu	10
2.2. Teori Strategi Politik	13
2.2.1. Pengertian Strategi	14
2.2.2. Tujuan Strategi Politik	15
2.2.3. Unsur-unsur Strategi Politik	16
2.2.4. Perumusan Strategi	17
2.2.5. Pelaksanaan Strategi	17
2.2.6. Evaluasi Strategi	17
2.3. Partai Politik	18
2.4. <i>Money Politics</i>	21
2.5. Etika Politik	26
2.6. Pemilihan Kepala Daerah	28
2.7. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Pendekatan Penelitian	34
3.2. Lokasi Penelitian	35
3.3. Informan Penelitian	36
3.4. Sumber Data	37
3.4.1. Data Primer	37

3.4.2. Data Sekunder	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data	38
3.5.1. Wawancara Mendalam	39
3.5.2. Dokumentasi	39
3.6. Teknik Analisis Data	39
3.7. Teknik Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Gambaran Umum Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen	42
4.1.1. Sejarah Singkat Partai Golkar	42
4.1.2. Struktur Kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Bireuen	43
4.1.3. Visi dan Misi Partai Golkar Kabupaten Bireuen	44
4.1.4. Peran Partai Golkar dalam Pilkada di Kabupaten Bireuen	45
4.2. Perumusan Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan Praktik <i>Money Politics</i>	47
4.3. Pelaksanaan Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan Praktik <i>Money Politics</i>	52
4.3.1. Komunikasi Politik Partai Golkar kepada Masyarakat	54
4.3.2. Pendidikan Politik Partai Golkar kepada Masyarakat	55
4.4. Evaluasi Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan Praktik <i>Money Politics</i>	56
4.5. Kendala Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam Mencegah Praktik <i>Money Politics</i>	58
4.5.1. Budaya Politik Masyarakat	59
4.5.2. Faktor Ekonomi Masyarakat	62
4.5.3. Tingginya Persaingan Politik	65
4.5.4. Keterbatasan Pengawasan di Lapangan	68
4.5.5. Bentuk Pengawasan dan Intervensi Partai Golkar terhadap Kader	71
4.5.6. Dampak <i>Money Politics</i> terhadap Demokrasi Lokal	75
4.6. Analisis Strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam Pencegahan Praktik	76
4.6.1. <i>Money Politics</i> Berdasarkan Teori Peter Schroder	76
4.6.2. Perumusan Strategi	77
4.6.3. Pelaksanaan Strategi	78
4.6.4. Evaluasi Strategi	80
4.7. Analisis Hasil Pelaksanaan Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan <i>Money Politics</i>	82
BAB V PENUTUP	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	87

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Surat Keputusan Pembimbing
LAMPIRAN 2	Skripsi Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
LAMPIRAN 3	Surat Balasan Izin Penelitian
LAMPIRAN 4	Instrumen Penelitian
LAMPIRAN 5	Dokumentasi Penelitian
LAMPIRAN 6	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan hak politik untuk memilih secara langsung kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat lokal. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari implementasi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.¹

Demokrasi lokal memiliki peran penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Melalui demokrasi lokal, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam menentukan pemimpin daerah yang dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya menjadi sarana pergantian kekuasaan politik, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil menjadi syarat penting dalam menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis dan berintegritas.²

Secara normatif, Pilkada diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun dalam praktiknya, proses demokrasi lokal masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah praktik *Money Politics*. Praktik *Money Politics* merupakan pemberian uang atau materi tertentu kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat dalam

¹ Didik Supriyanto, *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia* (Jakarta: Perludem, 2016), hlm. 25.

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 181.

pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.³ Fenomena tersebut tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga dapat menghasilkan kepemimpinan politik yang tidak didasarkan pada kapasitas dan integritas kandidat.

Dalam praktiknya, money politics tidak hanya dilakukan melalui pemberian uang tunai kepada pemilih, tetapi juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk lainnya, seperti pembagian sembako, pemberian pulsa atau paket data, bantuan transportasi bagi pemilih, pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat, hingga pemberian barang-barang kebutuhan rumah tangga menjelang hari pemungutan suara. Selain itu, praktik politik uang juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui tim sukses, tokoh masyarakat, maupun jaringan pendukung kandidat yang bertugas mendistribusikan berbagai bentuk bantuan dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat.⁴ Variasi bentuk praktik tersebut menunjukkan bahwa money politics terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial dan politik masyarakat, sehingga upaya pencegahannya memerlukan peran aktif partai politik, penyelenggara pemilu, serta masyarakat secara bersama-sama.

Praktik *Money Politics* memberikan dampak yang cukup besar terhadap kualitas demokrasi. Politik uang menyebabkan masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan visi, program, dan kapasitas kandidat, melainkan berdasarkan keuntungan material yang diterima dalam proses politik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan lahirnya pemimpin yang tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik serta mendorong meningkatnya praktik korupsi politik setelah kandidat

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 50.

⁴ Mada Sukmajati dan Edward Aspinall, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hlm. 63.

terpilih. Selain itu, politik uang juga menyebabkan biaya politik dalam Pilkada semakin tinggi sehingga demokrasi berjalan secara transaksional.⁵

Praktik *Money Politics* masih menjadi salah satu persoalan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya pada tingkat lokal. Tingginya kompetisi politik, lemahnya pendidikan politik masyarakat, serta budaya politik pragmatis menjadi faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut. Edward Aspinall menjelaskan bahwa praktik politik uang dalam demokrasi lokal di Indonesia sering berkaitan dengan hubungan patron-klien yang bersifat transaksional antara kandidat dan pemilih.⁶ Dalam kondisi tersebut, pemilih cenderung menempatkan politik sebagai hubungan pertukaran material dibandingkan sebagai proses demokrasi yang substantif.

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah yang memiliki kerentanan terhadap praktik *Money Politics*. Pada Pilkada tahun 2017, terdapat kasus politik uang yang diproses secara hukum oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen hingga ke pengadilan. Selain itu, tingginya persaingan politik pada Pemilu 2019 juga menunjukkan besarnya potensi praktik *Money Politics* dalam kontestasi politik lokal di daerah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bireuen.⁷

Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan empiris. Secara akademik, Kabupaten

⁵ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hlm. 34.

⁶ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), hlm. 45.

⁷ Ibit, hlm. 23.

Bireuen merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki dinamika politik lokal yang cukup tinggi pada setiap pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat serta kompetisi antarkandidat menjadikan daerah ini menarik untuk dikaji dalam perspektif strategi partai politik. Selain itu, Kabupaten Bireuen pernah menjadi perhatian publik akibat adanya dugaan dan penanganan kasus money politics pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, sehingga memberikan gambaran bahwa praktik politik uang masih menjadi tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Bireuen relevan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis bagaimana strategi Partai Golongan Karya dalam mencegah praktik money politics pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.⁸

Dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, praktik *Money Politics* masih sering ditemukan di berbagai daerah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan bahwa politik uang menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi dalam kontestasi politik lokal. Tingginya persaingan politik, lemahnya pengawasan, serta rendahnya pendidikan politik masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan praktik tersebut masih terus berlangsung dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia.⁹

Dalam konteks demokrasi lokal, partai politik memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada. Partai politik tidak hanya

⁸ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilu dan Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Bawaslu RI, 2022), hlm. 17.

⁹ Bawaslu Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilu dan Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Bawaslu RI, 2022), hlm. 17.

berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dan pengusung kandidat, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta membangun budaya politik yang demokratis.¹⁰ Melalui fungsi tersebut, partai politik diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik *Money Politics* dalam proses politik.

Sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia, Partai Golkar memiliki struktur organisasi yang kuat hingga tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bireuen. Partai Golkar memiliki peran strategis dalam proses pencalonan kepala daerah, pembinaan kader, serta pelaksanaan pendidikan politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan Partai Golkar dalam mencegah praktik *Money Politics* menjadi penting untuk dikaji.

Sebagai partai politik yang memiliki struktur organisasi kuat hingga tingkat daerah, Partai Golkar memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan politik dalam pencalonan kepala daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* menjadi penting untuk dikaji dalam konteks penguatan demokrasi lokal.¹¹

Penelitian mengenai praktik *Money Politics* sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih, persepsi

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 160.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 405.

masyarakat terhadap politik uang, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi partai politik dalam mencegah praktik Money Politics pada tingkat lokal masih relatif terbatas, terutama pada konteks Pilkada di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini memilih judul "*Strategi Partai Politik Golongan Karya dalam Pencegahan Praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen Tahun 2024)*" karena praktik *money politics* masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan demokrasi lokal di Indonesia. Selama ini, berbagai penelitian lebih banyak membahas *money politics* dari sisi perilaku pemilih, pola patronase, maupun dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengkaji bagaimana strategi partai politik dalam mencegah praktik *money politics*, terutama pada tingkat daerah, masih relatif terbatas. Padahal, partai politik merupakan aktor utama dalam sistem demokrasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik, melakukan pembinaan kader, serta membangun budaya politik yang demokratis dan berintegritas.¹²

Pemilihan fokus penelitian pada strategi Partai Golongan Karya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberhasilan pencegahan praktik *money politics* tidak hanya bergantung pada penegakan hukum oleh penyelenggara dan pengawas

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 405.

pemilu, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen partai politik dalam membangun integritas organisasi serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai strategi politik partai, sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai upaya yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai peran partai politik dalam memperkuat demokrasi lokal yang bersih dan berintegritas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik *Money Politics*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik *Money Politics*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian strategi partai politik dan pencegahan praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian strategi partai politik dan pencegahan praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai dinamika demokrasi lokal di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi lokal, strategi partai politik, dan perilaku politik masyarakat dalam Pilkada.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam merumuskan strategi pencegahan praktik *Money Politics*.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyelenggara dan pengawas pemilu dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik politik uang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran politik agar tidak terlibat dalam praktik *Money Politics* pada pelaksanaan Pilkada.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Selain itu, kajian terdahulu bertujuan untuk melihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan fokus kajian meskipun sama-sama membahas isu politik uang (*money politics*) dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Erin Malindra Ramadhani dengan judul *Pengaruh Money Politics terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014* menunjukkan bahwa praktik *money politics* berpengaruh terhadap perilaku pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Erin lebih menitikberatkan pada pengaruh *money politics* terhadap perilaku pemilih, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *money politics*.

Selanjutnya, penelitian Muhammad Suspin Selian yang berjudul *Persepsi Masyarakat terhadap Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019* menjelaskan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang beragam terhadap praktik politik uang. Sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dalam pelaksanaan pemilu. Berbeda dengan penelitian tersebut yang menitikberatkan pada persepsi masyarakat, penelitian ini mengkaji strategi yang

diterapkan oleh Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam upaya mencegah praktik *money politics*.

Penelitian Muhammad Hoiru Nail yang berjudul *Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum* menjelaskan bahwa pencegahan politik uang dapat dilakukan melalui pendekatan hukum serta pendidikan politik kepada masyarakat. Penelitian tersebut membahas strategi pencegahan politik uang secara umum, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *money politics* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Selain itu, penelitian Mada Sukmajati dan Edward Aspinall yang berjudul *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi bagian penting dalam kontestasi politik lokal di Indonesia melalui hubungan patronase dan klientelisme. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, di mana penelitian tersebut berfokus pada praktik politik uang dalam pemilu legislatif, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi partai politik, khususnya Partai Golkar Kabupaten Bireuen, dalam mencegah praktik *money politics* pada pemilihan kepala daerah.

Terakhir, penelitian Firman Noor yang berjudul *Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat* menjelaskan bahwa partai politik memiliki fungsi penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas demokrasi. Meskipun sama-sama membahas peran partai politik, penelitian tersebut berfokus pada pendidikan politik secara umum,

sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *money politics*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara spesifik mengkaji strategi pencegahan *money politics* yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam konteks pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih, persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang, serta bentuk-bentuk politik uang dalam pemilu dan Pilkada. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas strategi partai politik dalam mencegah praktik Money Politics masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena berfokus pada strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik Money Politics pada Pilkada 2024 dengan menggunakan teori strategi politik Peter Schroder yang meliputi perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini lebih difokuskan pada strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Penelitian ini juga menekankan pada bagaimana partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik, pengawasan internal, serta komunikasi politik kepada masyarakat dalam upaya menciptakan demokrasi yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan

dengan strategi partai politik dalam pencegahan praktik *Money Politics* pada demokrasi lokal.

1.2. Teori Strategi Politik

Strategi politik merupakan suatu langkah atau cara yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan politik tertentu. Strategi politik digunakan oleh aktor politik maupun partai politik untuk memperoleh dukungan masyarakat, mempertahankan legitimasi politik, dan mencapai tujuan organisasi politik dalam sistem demokrasi.¹³

Menurut Peter Schroder, strategi politik merupakan keseluruhan metode dan tindakan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan politik dengan mempertimbangkan kondisi politik, perilaku masyarakat, dan sumber daya organisasi yang dimiliki.¹⁴ Strategi politik tidak hanya berorientasi pada kemenangan politik, tetapi juga pada pembentukan citra politik, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi politik.

Dalam konteks demokrasi, strategi politik memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi politiknya. Strategi politik yang baik dapat membantu partai politik dalam membangun komunikasi politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjaga kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pemilu maupun Pilkada.

¹³ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 145.

¹⁴ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 12.

Dalam penelitian ini, teori strategi politik digunakan sebagai grand theory untuk menganalisis strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah.

1.2.1. Pengertian Strategi

Strategi politik merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis oleh aktor politik maupun partai politik untuk mencapai tujuan politik tertentu melalui pemanfaatan sumber daya, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang efektif. Strategi politik tidak hanya berorientasi pada kemenangan dalam kontestasi politik, tetapi juga mencakup bagaimana partai politik membangun legitimasi, memperoleh kepercayaan masyarakat, serta mempertahankan dukungan politik secara berkelanjutan.

Menurut Peter Schroder, strategi politik adalah keseluruhan keputusan dan tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan politik tertentu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan politik, kekuatan organisasi, serta perilaku masyarakat. Strategi politik harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika politik agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.¹⁵

Sementara itu, Firmanzah menjelaskan bahwa strategi politik merupakan proses penyusunan langkah-langkah politik yang dilakukan secara terencana melalui pemetaan kondisi politik, identifikasi aktor yang terlibat, penyusunan program, hingga pelaksanaan komunikasi politik kepada masyarakat. Strategi

¹⁵ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 12.

politik menjadi instrumen penting bagi partai politik dalam memenangkan kompetisi politik sekaligus menjaga citra organisasi di tengah masyarakat.¹⁶

Dengan demikian, strategi politik dalam penelitian ini dipahami sebagai serangkaian langkah yang dirancang oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik money politics melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi sesuai dengan kondisi politik lokal.

1.2.2. Tujuan Strategi Politik

Strategi politik disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap aktivitas politik suatu organisasi. Keberadaan strategi memungkinkan partai politik menentukan prioritas kebijakan, mengoptimalkan sumber daya organisasi, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Tanpa strategi yang tepat, pelaksanaan aktivitas politik cenderung berlangsung secara sporadis dan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Peter Schroder, tujuan utama strategi politik adalah menciptakan langkah yang efektif agar tujuan politik organisasi dapat tercapai melalui proses yang terencana, terukur, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan politik.¹⁷

Firmanzah juga menjelaskan bahwa strategi politik bertujuan membangun kepercayaan publik (political trust), memperkuat citra partai, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperoleh legitimasi politik secara demokratis.¹⁸ Oleh karena itu, strategi politik tidak hanya berorientasi pada kemenangan dalam

¹⁶ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 145.

¹⁷ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 14.

¹⁸ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 149.

pemilihan umum, tetapi juga pada pembentukan hubungan jangka panjang antara partai politik dengan masyarakat.

Dalam penelitian ini, tujuan strategi politik Partai Golkar Kabupaten Bireuen tidak hanya diarahkan untuk memperoleh dukungan politik, tetapi juga untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pilkada yang bersih melalui upaya pencegahan praktik money politics.

1.2.3. Unsur-unsur Strategi Politik

Pelaksanaan strategi politik dipengaruhi oleh beberapa unsur yang saling berkaitan. Menurut Peter Schroder, strategi politik yang efektif harus mempertimbangkan tujuan organisasi, kondisi lingkungan politik, sumber daya organisasi, aktor politik yang terlibat, serta sasaran politik yang ingin dicapai.¹⁹ Seluruh unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk strategi yang akan diterapkan oleh partai politik.

Selain itu, strategi politik juga memerlukan komunikasi politik yang efektif, kepemimpinan organisasi yang kuat, kemampuan melakukan evaluasi, serta dukungan kader partai. Menurut Almond dan Powell, komunikasi politik merupakan salah satu fungsi utama sistem politik yang memungkinkan terjadinya penyampaian informasi, nilai, dan kebijakan antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat.²⁰

Dalam konteks penelitian ini, unsur-unsur strategi politik tercermin melalui proses penyusunan strategi oleh Partai Golkar Kabupaten Bireuen, pelaksanaan

¹⁹ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 16.

²⁰ Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach* (Boston: Little Brown, 1966), hlm. 77.

pendidikan politik kepada masyarakat, pengawasan terhadap kader partai, serta evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pencegahan money politics selama Pilkada Tahun 2024.



1.2.4. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahap awal dalam menentukan arah dan tujuan organisasi. Pada tahap ini organisasi melakukan identifikasi terhadap peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki untuk menentukan strategi yang akan digunakan.²¹

Dalam konteks penelitian ini, perumusan strategi berkaitan dengan bagaimana Partai Golkar Kabupaten Bireuen menyusun strategi pencegahan praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah.

1.2.5. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi merupakan tahap implementasi dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada tahap ini partai politik melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan.²²

Dalam penelitian ini, pelaksanaan strategi berkaitan dengan bentuk upaya yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics*, seperti pendidikan politik, pengawasan kader, dan pendekatan kepada masyarakat.

1.2.6. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap penilaian terhadap efektivitas strategi yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana strategi

²¹ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 15.

²² Ibid, hlm. 18.

yang diterapkan mampu mencapai tujuan organisasi serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut.²³

Dalam penelitian ini, evaluasi strategi digunakan untuk melihat efektivitas strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.3. Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu institusi penting dalam sistem demokrasi. Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, pendidikan politik, serta penghubung antara masyarakat dan pemerintah.²⁴

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan mempertahankan kekuasaan tersebut melalui cara-cara konstitusional.²⁵ Partai politik memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem demokrasi, di antaranya sebagai sarana pendidikan politik, sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, dan sarana rekrutmen politik. Melalui fungsi tersebut, partai politik memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi.

Partai politik diharapkan mampu membangun pendidikan politik yang berorientasi pada peningkatan kesadaran politik masyarakat agar masyarakat dapat

²³ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 20.

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 160.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 161.

berpartisipasi secara rasional dalam proses demokrasi.²⁶ Selain itu, partai politik juga memiliki tanggung jawab dalam membangun budaya politik yang sehat melalui pembinaan kader dan penguatan etika politik dalam organisasi partai. Peran tersebut menjadi penting karena partai politik merupakan aktor utama yang terlibat dalam proses pencalonan kepala daerah serta mobilisasi dukungan politik masyarakat.²⁷ Oleh karena itu, keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik dan pengawasan internal sangat memengaruhi kualitas pelaksanaan demokrasi lokal, khususnya dalam upaya mencegah praktik *Money Politics* pada Pilkada.²⁸

Menurut Gabriel A. Almond, partai politik memiliki fungsi penting sebagai sarana artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik dalam sistem demokrasi.²⁹ Melalui fungsi tersebut, partai politik berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses pelaksanaan demokrasi. Selain itu, partai politik juga memiliki fungsi dalam menjaga stabilitas politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dalam konteks demokrasi lokal, partai politik menjadi salah satu aktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.³⁰

Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan pemilu dan Pilkada. Partai politik juga memiliki

²⁶ Ibid, hlm. 408.

²⁷ Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach* (Boston: Little Brown, 1966), hlm. 77.

²⁸ Firman Noor, *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Obor Indonesia, 2015), hlm. 105.

²⁹ Ibid, hlm. 75.

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 167.

tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tercipta budaya politik yang demokratis dan berintegritas. Dalam penelitian ini, partai politik dipahami sebagai organisasi politik yang memiliki peran strategis dalam mencegah praktik *Money Politics* melalui pendidikan politik, pengawasan kader, dan pembentukan budaya politik yang sehat.

Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi penting partai politik dalam sistem demokrasi. Pendidikan politik bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mampu memahami hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.³¹ Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara rasional dalam proses demokrasi serta tidak mudah dipengaruhi oleh praktik-praktik politik transaksional seperti *Money Politics*.

Kaderisasi merupakan proses pembinaan anggota partai untuk membentuk kader yang memiliki kemampuan politik, loyalitas organisasi, serta pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi.³² Melalui kaderisasi, partai politik dapat membangun sumber daya politik yang berkualitas dan mampu menjalankan fungsi partai secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, kaderisasi menjadi penting karena berkaitan dengan upaya Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam membangun kesadaran politik kader agar tidak terlibat dalam praktik *Money Politics* pada pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan kader menjadi bagian penting dalam strategi partai politik untuk menjaga kualitas demokrasi lokal.

³¹ Firman Noor, *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Obor Indonesia, 2015), hlm. 91.

³² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 172.

1.4. *Money Politics*

Money Politics atau politik uang merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam proses demokrasi elektoral. Praktik ini dilakukan dengan cara memberikan uang atau materi tertentu kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat dalam pemilu maupun Pilkada.³³

Menurut Edward Aspinall, praktik politik uang dalam demokrasi lokal di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan patron-klien yang bersifat transaksional antara kandidat dan pemilih.³⁴ Dalam hubungan tersebut, dukungan politik masyarakat sering kali dipengaruhi oleh pemberian material dibandingkan pertimbangan terhadap visi, program, dan kapasitas kandidat.

Dalam praktik demokrasi lokal di Indonesia, *Money Politics* juga berkaitan erat dengan pola hubungan patronase dan klientelisme politik. Patronase merupakan hubungan politik yang didasarkan pada pemberian keuntungan material oleh kandidat atau elite politik kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh dukungan politik.³⁵ Sementara itu, klientelisme merupakan hubungan timbal balik yang bersifat transaksional antara pemberi dan penerima dukungan politik.

Dalam hubungan klientelisme, masyarakat sebagai pemilih sering kali memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu karena adanya hubungan kedekatan, bantuan ekonomi, maupun keuntungan material yang diterima selama proses politik berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan demokrasi berjalan

³³ Didik Supriyanto, *Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 45.

³⁴ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), hlm. 52.

³⁵ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hlm. 21.

secara transaksional dan mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada.³⁶

Praktik *Money Politics* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang secara langsung kepada pemilih, pemberian bantuan atau barang tertentu, pemberian fasilitas kepada kelompok masyarakat, serta mobilisasi pemilih dengan imbalan tertentu. Praktik tersebut umumnya dilakukan untuk memperoleh dukungan politik secara instan dalam kontestasi pemilu maupun Pilkada. Praktik *Money Politics* dalam pelaksanaan demokrasi dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu pemberian uang secara langsung kepada pemilih, pemberian barang kebutuhan pokok, bantuan sosial, pembayaran transportasi politik, hingga pemberian janji tertentu kepada kelompok masyarakat.³⁷ Praktik tersebut umumnya dilakukan menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan memperoleh dukungan politik masyarakat secara instan.

Selain dilakukan secara langsung, praktik *Money Politics* juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui perantara tim sukses, tokoh masyarakat, maupun jaringan politik tertentu di tingkat lokal. Dalam konteks demokrasi lokal, pola tersebut sering dilakukan untuk menghindari pengawasan dari lembaga pengawas pemilu maupun aparat penegak hukum.³⁸

Praktik *Money Politics* memberikan dampak negatif terhadap kualitas demokrasi karena dapat menghilangkan prinsip kebebasan memilih dan mendorong

³⁶ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), hlm. 88.

³⁷ Mada Sukmajati dan Edward Aspinall, *Politik Uang di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hlm. 63.

³⁸ Ibid, hlm. 71.

terbentuknya budaya politik pragmatis di masyarakat. Selain itu, praktik politik uang juga dapat meningkatkan biaya politik dalam kontestasi demokrasi lokal.

Selain merusak kualitas demokrasi, praktik *Money Politics* juga dapat meningkatkan biaya politik dalam kontestasi Pilkada. Tingginya biaya politik tersebut menyebabkan kandidat politik cenderung mengeluarkan modal besar untuk memperoleh dukungan suara masyarakat. Kondisi ini berpotensi mendorong munculnya praktik korupsi politik setelah kandidat terpilih karena adanya upaya untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan.³⁹ Selain itu, praktik *Money Politics* juga menyebabkan masyarakat kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihan politik secara rasional. Pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan keuntungan material yang diterima dibandingkan mempertimbangkan kualitas kepemimpinan, visi, dan program kerja kandidat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang dapat melemahkan pelaksanaan demokrasi substantif di tingkat lokal.⁴⁰

Dalam penelitian ini, praktik *Money Politics* dipahami sebagai bentuk pelanggaran demokrasi yang menjadi fokus pencegahan oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen. Praktik *Money Politics* dalam pelaksanaan demokrasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang, barang, bantuan sosial, maupun janji tertentu kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh dukungan politik. Dalam konteks Pilkada, praktik politik uang sering dilakukan

³⁹ Didik Supriyanto, *Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 57.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 417.

pada masa kampanye, menjelang hari pemungutan suara, maupun setelah proses pemilihan berlangsung.

Menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, praktik *Money Politics* tidak hanya dipengaruhi oleh kandidat politik, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat dan tingginya biaya politik dalam kontestasi demokrasi lokal. Oleh karena itu, praktik politik uang menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, praktik *Money Politics* tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran politik, tetapi juga sebagai permasalahan budaya politik yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Dalam konteks demokrasi lokal, praktik *Money Politics* menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Tingginya persaingan politik antar kandidat, lemahnya pengawasan, serta rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat menyebabkan praktik politik uang masih sulit dihilangkan dalam kontestasi politik lokal.⁴¹

Praktik *Money Politics* dalam demokrasi lokal tidak hanya berdampak terhadap proses pemilihan kepala daerah, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan antara masyarakat dan partai politik. Dalam kondisi politik yang transaksional, masyarakat cenderung memandang politik sebagai sarana memperoleh keuntungan material jangka pendek dibandingkan sebagai proses demokrasi untuk menentukan pemimpin yang berkualitas.⁴² Selain itu, praktik

⁴¹ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 201.

⁴² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 420.

politik uang juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan lembaga politik.

Masyarakat menjadi apatis terhadap proses politik karena menganggap bahwa kemenangan politik lebih ditentukan oleh kekuatan modal dibandingkan kualitas kandidat dan program politik yang ditawarkan. Kondisi tersebut menyebabkan demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya substantif.⁴³ Dalam konteks Pilkada, praktik *Money Politics* juga menyebabkan meningkatnya biaya politik yang harus dikeluarkan kandidat. Tingginya biaya politik tersebut berpotensi mendorong munculnya praktik korupsi politik setelah kandidat terpilih, karena adanya upaya untuk mengembalikan modal politik yang telah digunakan selama proses pemilihan. Oleh karena itu, praktik politik uang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan demokrasi lokal yang bersih dan berintegritas.⁴⁴

Praktik *Money Politics* dalam Pilkada tidak hanya dilakukan oleh kandidat politik, tetapi juga melibatkan tim sukses, elite lokal, serta jaringan sosial politik di masyarakat. Dalam kondisi tersebut, politik uang berkembang menjadi budaya politik pragmatis yang memengaruhi perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihan politik.⁴⁵ Oleh karena itu, pencegahan praktik *Money Politics* tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendidikan politik, penguatan pengawasan demokrasi, serta peran

⁴³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 194.

⁴⁴ Didik Supriyanto, *Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 61.

⁴⁵ Ibid, hlm. 193.

aktif partai politik dalam membangun budaya politik yang demokratis dan berintegritas.

Dalam penelitian ini, Money Politics dimaknai sebagai segala bentuk pemberian uang, barang, bantuan materi, atau fasilitas tertentu yang dilakukan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

1.5. Etika Politik

Etika politik merupakan cabang etika yang membahas nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan politik. Etika politik tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, integritas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dalam setiap aktivitas politik. Dengan demikian, praktik politik yang dilakukan oleh individu maupun partai politik tidak hanya dinilai dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari aspek moralitasnya.

Menurut Franz Magnis-Suseno, etika politik adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, partai politik, maupun masyarakat dalam menjalankan aktivitas politik demi mewujudkan kehidupan bersama yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan umum.⁴⁶ Oleh karena itu, politik seharusnya tidak dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh

⁴⁶ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 35.

kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

Dalam perspektif etika politik, praktik money politics merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi karena menghilangkan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan politik secara rasional. Politik uang mendorong hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih sehingga proses demokrasi bergeser dari kompetisi gagasan menuju pertukaran kepentingan ekonomi. Akibatnya, kualitas demokrasi menurun karena pemilih tidak lagi menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, dan kapasitas calon, melainkan berdasarkan keuntungan material yang diterima.

Selain itu, praktik money politics juga bertentangan dengan nilai integritas politik. Integritas dalam politik menuntut adanya konsistensi antara nilai moral, aturan hukum, dan tindakan politik yang dilakukan oleh para aktor politik. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki tanggung jawab moral untuk membangun budaya politik yang berintegritas melalui pendidikan politik, pembinaan kader, serta pengawasan terhadap seluruh aktivitas politik yang dilakukan oleh anggotanya. Dengan demikian, penerapan etika politik menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mencegah praktik money politics dan memperkuat kualitas demokrasi lokal.

Dalam konteks penelitian ini, etika politik menjadi landasan normatif untuk menilai strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik money politics. Strategi yang diterapkan tidak hanya dipandang sebagai upaya organisatoris dalam memenangkan kompetisi politik, tetapi juga sebagai

bentuk tanggung jawab moral partai politik dalam menjaga integritas demokrasi, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil, dan berintegritas.

Berdasarkan uraian tersebut, etika politik menjadi landasan normatif dalam penelitian ini untuk menilai strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik money politics. Strategi yang dijalankan tidak hanya dipandang sebagai upaya organisasi politik untuk memperoleh dukungan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi dan mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan berintegritas.

1.6. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum sering dipandang sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat menggunakan hak politiknya untuk menentukan pemimpin yang akan menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, mekanisme tersebut diwujudkan melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).⁴⁷

Secara yuridis, penyelenggaraan Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk

⁴⁷ Didik Supriyanto, *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia* (Jakarta: Perludem, 2016, hlm. 45).

implementasi prinsip demokrasi dan desentralisasi.⁴⁸ Pemilihan kepala daerah tidak hanya merupakan prosedur administratif, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat demokrasi lokal.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi efektif dan kompetisi yang adil dalam proses pemilihan.⁴⁹ Dalam konteks Pilkada, prinsip tersebut diwujudkan melalui kontestasi antar-kandidat yang dilakukan secara terbuka dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun demikian, dalam praktiknya Pilkada di Indonesia sering diwarnai oleh berbagai persoalan, salah satunya adalah praktik *Money Politics*. Kompetisi yang tinggi dan kebutuhan dukungan elektoral yang besar menjadikan Pilkada sebagai arena yang rentan terhadap praktik transaksional antara kandidat dan pemilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Pilkada merupakan sarana demokrasi, secara empiris masih terdapat tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang substantif.⁵⁰ Oleh karena itu, pemahaman mengenai Pilkada tidak hanya dilihat sebagai mekanisme pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga sebagai arena politik yang memerlukan pengawasan dan strategi pencegahan terhadap praktik-praktik yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi lokal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Dalam pelaksanaannya, Pilkada diharapkan mampu melahirkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi politik dan mendapat

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

⁴⁹ Robert A. Dahl, *On Democracy*, (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 37.

⁵⁰ Didik Supriyanto, *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia* (Jakarta: Perludem, 2016), hlm. 45.

dukungan masyarakat secara demokratis. Namun demikian, pelaksanaan Pilkada di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik *Money Politics*. Praktik tersebut menyebabkan proses demokrasi tidak berjalan secara ideal karena pilihan politik masyarakat sering dipengaruhi oleh pemberian uang atau materi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peran partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam menciptakan pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.

Dalam pelaksanaan demokrasi lokal, Pilkada tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Melalui Pilkada, masyarakat diharapkan mampu menentukan pilihan politik secara bebas, rasional, dan bertanggung jawab berdasarkan visi serta program kandidat.⁵¹ Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya praktik *Money Politics*. Tingginya persaingan politik dan lemahnya pengawasan menyebabkan praktik politik uang masih sering ditemukan dalam proses demokrasi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu secara prosedural, tetapi juga ditentukan oleh integritas pelaksanaan demokrasi itu sendiri.⁵²

1.7. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah.

⁵¹ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 39.

⁵² Didik Supriyanto, *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia* (Jakarta: Perludem, 2016), hlm. 53.

Dalam penelitian ini, teori strategi politik Peter Schroder digunakan sebagai grand theory untuk menganalisis strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen. Dalam penelitian ini, praktik *Money Politics* dipahami sebagai salah satu bentuk penyimpangan demokrasi yang dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Praktik tersebut tidak hanya berdampak terhadap perilaku politik masyarakat, tetapi juga memengaruhi kualitas kepemimpinan politik yang dihasilkan melalui proses demokrasi lokal.⁵³ Oleh karena itu, diperlukan strategi politik yang tepat dari partai politik untuk mencegah praktik *Money Politics* dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam konteks penelitian ini, Partai Golkar Kabupaten Bireuen dipahami sebagai aktor politik yang memiliki peran penting dalam pendidikan politik masyarakat, pengawasan kader, serta pelaksanaan komunikasi politik dalam proses demokrasi lokal.

Teori strategi politik tersebut memiliki tiga indikator utama, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Ketiga indikator tersebut digunakan sebagai dasar analisis dalam melihat strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics*. Selain itu, konsep partai politik digunakan untuk menjelaskan peran partai politik dalam pendidikan politik dan pengawasan kader, sedangkan konsep *Money Politics* digunakan untuk memahami bentuk-bentuk praktik politik uang dalam Pilkada.

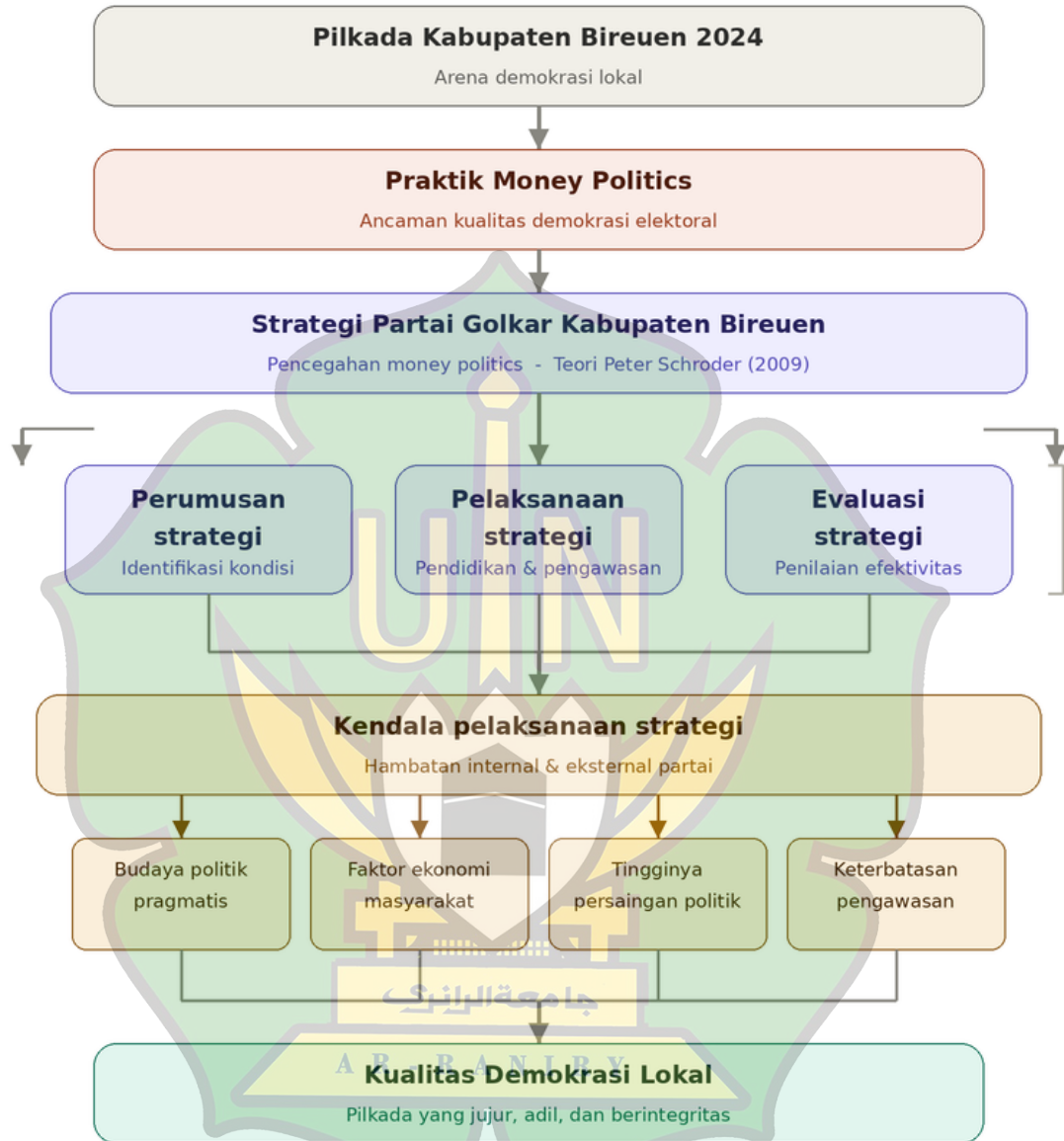
Berdasarkan teori strategi politik Peter Schroder, strategi politik dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan

⁵³ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hlm. 56.

strategi, dan evaluasi strategi. Dalam penelitian ini, ketiga indikator tersebut digunakan untuk menganalisis strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam pencegahan praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Melalui indikator tersebut, penelitian ini berupaya memahami bagaimana strategi yang dilakukan partai politik dalam mencegah praktik politik uang serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berdasarkan perspektif teori strategi politik Peter Schroder. Melalui teori tersebut, penelitian ini berfokus pada proses perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi yang dilakukan partai politik dalam menghadapi praktik *Money Politics* di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memahami kendala yang dihadapi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik *Money Politics*, baik yang berasal dari faktor internal partai maupun faktor eksternal seperti budaya politik masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, dan tingginya persaingan politik dalam Pilkada. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran partai politik dalam menciptakan demokrasi lokal yang jujur, adil, dan berintegritas.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan politik secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.⁵⁴ Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif.⁵⁵

Sejalan dengan itu, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah.⁵⁶ Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap strategi politik yang dilakukan partai politik dalam konteks demokrasi lokal.

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena peneliti ingin memahami fenomena praktik *Money Politics* dan strategi partai politik secara

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.6.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9.

⁵⁶ Ibid, hlm. 6.

mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara lebih rinci mengenai perilaku politik, pandangan informan, serta dinamika politik lokal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada.⁵⁷

Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau mencari hubungan kuantitatif antarvariabel, melainkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh informasi secara mendalam mengenai perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi yang dilakukan Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics*.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Partai Golkar Kabupaten Bireuen. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Partai Golkar Kabupaten Bireuen merupakan salah satu partai politik yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bireuen. Selain itu, Kabupaten Bireuen juga merupakan salah satu daerah yang memiliki kerentanan terhadap praktik *Money Politics* dalam kontestasi politik lokal sehingga menarik untuk diteliti dalam konteks strategi partai politik dalam pencegahan praktik tersebut. Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 13.

pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki dinamika politik lokal yang cukup aktif dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Tingginya partisipasi politik masyarakat dan persaingan antar kandidat dalam Pilkada menjadikan Kabupaten Bireuen menarik untuk diteliti dalam konteks strategi partai politik dalam pencegahan praktik *Money Politics*. Selain itu, Partai Golkar Kabupaten Bireuen merupakan salah satu partai politik yang memiliki struktur organisasi aktif di tingkat daerah sehingga dianggap relevan dengan fokus penelitian mengenai strategi partai politik dalam demokrasi lokal.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁸ Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁵⁹ Informan dipilih karena dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan memahami strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam pencegahan praktik *Money Politics*.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan Pilkada serta strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics*. Informan terdiri dari pengurus partai, kader partai, tim politik, dan masyarakat yang dianggap memahami

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 108.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157.

fenomena yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena penelitian ini membutuhkan informan yang benar-benar memiliki pengalaman dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.⁶⁰ Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

N o	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1	H. Yusri Abdullah, S.Sos	Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen	Informan Utama
2	Muhammad Raja, S.H	Anggota BSNPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen	Informan Pendukung
3	T. Hasib Nailulsyah, S.Pd	Anggota AMPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen	Informan Pendukung
4	Mursyid, S.Pd	Calon DPRK Dapil II Kuala Kabupaten Bireuen	Informan Pendukung
5	Husni Algifahri	Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024 Kabupaten Bireuen	Informan Pendukung

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

2.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui proses wawancara.⁶¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus Partai Golkar Kabupaten Bireuen, kader partai, dan pihak terkait lainnya.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 224.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 137

2.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian.⁶² Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dokumen partai, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam
2. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data memiliki peran penting dalam memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi empiris penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan meningkatkan validitas data penelitian.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.186.

2.5.1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan penelitian.⁶³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah.

Wawancara ini juga dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi daring seperti telepon atau aplikasi konferensi video apabila terdapat keterbatasan jarak dan waktu. Data hasil wawancara dicatat dan direkam dengan persetujuan informan guna menjaga keakuratan informasi. Sehingga data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian.

2.5.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen, arsip, foto, berita, maupun data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁴ Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara, berupa dokumen partai, struktur organisasi, kebijakan internal, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada dan pencegahan *Money Politics*.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 124.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 174

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.⁶⁵ Model ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

Reduksi Data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Penyajian Data, yaitu penyusunan data dalam bentuk uraian naratif deskriptif untuk memudahkan analisis. Penarikan Kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai dilakukan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara bertahap untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁶⁶ Peneliti juga melakukan proses interpretasi data dengan menghubungkan hasil penelitian di lapangan dengan teori strategi politik Peter Schroder sebagai dasar analisis penelitian. Melalui proses tersebut, peneliti berupaya memahami strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menyajikan hasil wawancara dalam bentuk tanya jawab secara langsung sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah

⁶⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 20.

⁶⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 2014), hlm. 33.

disusun. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari informan tidak selalu disampaikan secara sistematis sesuai dengan urutan pertanyaan. Oleh karena itu, peneliti melakukan proses pengolahan data melalui tahapan reduksi data dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dikategorisasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti strategi partai, kendala yang dihadapi, serta upaya pencegahan praktik *Money Politics*. Hasil pengolahan data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar lebih sistematis, mudah dipahami, serta dapat mendukung proses analisis dalam penelitian ini.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber.⁶⁷

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda untuk memperoleh data yang valid dan objektif mengenai strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics*.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 189.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen

3.1.1. Sejarah Singkat Partai Golkar

Partai Golkar merupakan salah satu partai politik besar di Indonesia yang memiliki pengaruh penting dalam perkembangan politik nasional. Partai Golkar awalnya dikenal sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang dibentuk pada tahun 1964 sebagai wadah kerja sama berbagai organisasi fungsional di Indonesia. Dalam perkembangannya, Partai Golkar menjadi salah satu kekuatan politik yang aktif dalam sistem demokrasi Indonesia.⁶⁸

Sebagai partai politik nasional, Partai Golkar memiliki struktur organisasi hingga tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bireuen. Dalam pelaksanaan demokrasi lokal, Partai Golkar Kabupaten Bireuen memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik sebagai partai pengusung kandidat maupun sebagai sarana pendidikan politik masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Partai Golkar Kabupaten Bireuen menyadari bahwa praktik *Money Politics* masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, partai berupaya melakukan berbagai strategi dalam mencegah praktik tersebut melalui pendidikan politik, pembinaan kader, dan pengawasan internal partai.

⁶⁸ DPP Partai Golkar, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar* (Jakarta: DPP Partai Golkar, 2020), hlm. 5.

3.1.2. Struktur Kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Bireuen

Struktur organisasi Partai Golkar di tingkat kabupaten dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Struktur ini bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan partai di tingkat daerah, termasuk strategi politik dalam menghadapi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Secara umum struktur organisasi Partai Golkar Kabupaten Bireuen terdiri dari:

1. Ketua DPD Sekretaris
2. Bendahara
3. Bidang Organisasi
4. Bidang Kaderisasi
5. Bidang Pemenangan Pemilu
6. Bidang Pendidikan Politik

Struktur organisasi ini berfungsi untuk menjalankan program partai serta memastikan bahwa kegiatan politik partai berjalan sesuai dengan aturan organisasi. Selain itu, Partai Golkar Kabupaten Bireuen juga memiliki organisasi sayap partai seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) yang turut mendukung kegiatan politik partai dalam pelaksanaan Pilkada. Adapun informan dalam penelitian ini yang merupakan bagian dari struktur Partai Golkar Kabupaten Bireuen antara lain:

No	Nama Informan	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	H. Yusri Abdullah, S.Sos	Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen	06/April/2026
2	Muhammad Raja, S.H	Anggota BSNPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen	13/April/2026
3	T. Hasib Nailulsyah, S.Pd	Anggota AMPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen	14/April/2026
4	Mursyid, S.Pd	Calon DPRK Dapil II Kuala Kabupaten Bireuen	06/April/2026

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan hasil penelitian, struktur kepengurusan partai memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan politik, komunikasi politik, dan pengawasan internal partai dalam proses Pilkada.

3.1.3. Visi dan Misi Partai Golkar Kabupaten Bireuen

Sebagai salah satu partai politik nasional yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat daerah, Partai Golkar Kabupaten Bireuen memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan Partai Golkar secara nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Dalam pelaksanaan politik di daerah, Partai Golkar Kabupaten Bireuen berupaya membangun sistem politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas demokrasi lokal.⁶⁹

⁶⁹ DPP Partai Golongan Karya, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar*, (Jakarta: DPP Partai Golkar, 2020), hlm. 12.

Visi Partai Golkar Kabupaten Bireuen adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Bireuen yang maju, sejahtera, demokratis, dan berkeadilan melalui pembangunan politik yang bersih dan berintegritas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Golkar Kabupaten Bireuen memiliki beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kader partai melalui pendidikan politik dan kaderisasi yang Berkelanjutan.
2. Membangun partisipasi politik masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.
3. Menjalankan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah.
4. Mendorong terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, dan bebas dari praktik *Money Politics*.
5. Memperkuat konsolidasi organisasi partai hingga tingkat daerah guna meningkatkan pelayanan politik kepada masyarakat.⁷⁰

Melalui visi dan misi tersebut, Partai Golkar Kabupaten Bireuen berupaya menjalankan perannya sebagai partai politik yang tidak hanya berorientasi pada kemenangan politik, tetapi juga pada penguatan demokrasi dan pendidikan politik masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, visi dan misi tersebut menjadi dasar bagi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam merumuskan strategi pencegahan praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah.

⁷⁰ DPP Partai Golongan Karya, *Platform dan Program Umum Partai Golkar*, (Jakarta: DPP Partai Golkar, 2020), hlm. 18.

3.1.4. Peran Partai Golkar dalam Pilkada di Kabupaten Bireuen

Dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia, partai politik memiliki peran penting dalam proses pencalonan kepala daerah. Partai Golkar sebagai salah satu partai politik besar turut berperan dalam proses tersebut di Kabupaten Bireuen. Peran tersebut meliputi:

1. Mengusung calon kepala daerah.
2. Mengorganisir tim pemenangan.
3. Melakukan kampanye politik kepada masyarakat.
4. Mengawasi kader dan simpatisan dalam kegiatan politik.

Selain itu, partai juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga proses demokrasi agar berjalan secara jujur dan adil, termasuk mencegah terjadinya praktik *Money Politics*. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 April 2026, beliau menjelaskan bahwa:

“Partai Golkar Kabupaten Bireuen terus berupaya memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Selain itu, kader partai juga selalu diingatkan agar tidak melakukan praktik Money Politics dalam proses politik di masyarakat.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa Partai Golkar Kabupaten Bireuen tidak hanya berfokus pada kepentingan politik elektoral, tetapi juga berupaya menjaga citra partai melalui pendidikan politik dan pembinaan kader partai.

⁷¹ Wawancara dengan H. Yusri Abdullah, S.Sos., Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen, di Bireuen, 6 April 2026.

4.2. Perumusan Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan Praktik *Money Politics*

Perumusan strategi merupakan tahap awal yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam menentukan langkah-langkah pencegahan praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah. Pada tahap ini, partai melakukan identifikasi terhadap kondisi politik masyarakat serta potensi terjadinya praktik politik uang dalam kontestasi Pilkada. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen, beliau menjelaskan bahwa:

*“Partai Golkar Kabupaten Bireuen selalu memberikan arahan kepada kader agar menjalankan proses politik secara sehat dan tidak melakukan praktik Money Politics. Kami juga berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa politik uang dapat merusak demokrasi dan memengaruhi kualitas pemimpin yang dipilih.”*⁷²

Berdasarkan hasil penelitian, Partai Golkar Kabupaten Bireuen menyadari bahwa praktik *Money Politics* merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal. Oleh karena itu, partai berupaya merumuskan strategi politik yang tidak hanya berorientasi pada kemenangan politik, tetapi juga pada upaya menjaga kualitas demokrasi.⁷³ Perumusan strategi tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan politik kepada kader partai dan masyarakat. Selain itu, Partai Golkar Kabupaten Bireuen juga menekankan pentingnya komunikasi politik yang sehat kepada masyarakat agar pelaksanaan Pilkada tidak didominasi oleh praktik-praktik politik transaksional.⁷⁴

⁷² H. Yusri Abdullah, wawancara, 6 April 2026.

⁷³ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 24.

⁷⁴ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 154.

Dalam konteks ini, strategi politik yang dirumuskan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya upaya partai untuk membangun citra politik yang demokratis dan berintegritas dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Partai Golkar Kabupaten Bireuen berupaya membangun strategi politik yang berorientasi pada penguatan pendidikan politik dan pembinaan internal partai. Strategi tersebut menunjukkan bahwa partai tidak hanya berfokus pada kemenangan politik dalam Pilkada, tetapi juga berupaya menjaga legitimasi politik partai di tengah masyarakat. Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, perumusan strategi politik merupakan langkah awal organisasi politik dalam menentukan arah dan tujuan politik yang ingin dicapai.⁷⁵ Dalam konteks penelitian ini, strategi yang dirumuskan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dilakukan melalui pendekatan pendidikan politik dan penguatan pengawasan internal terhadap kader partai.

Peneliti melihat bahwa langkah tersebut merupakan bentuk upaya partai dalam membangun citra politik yang positif di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap praktik *Money Politics* dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu, strategi tersebut juga menunjukkan adanya kesadaran partai politik mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi lokal melalui proses politik yang bersih dan demokratis.

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa pendidikan politik menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi oleh pemberian uang atau materi tertentu dalam Pilkada.

⁷⁵ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 15.

Pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menjadi bagian penting dalam proses perumusan strategi pencegahan praktik *Money Politics*. Melalui pendidikan politik, partai berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi oleh pemberian uang atau materi tertentu dalam pelaksanaan Pilkada.

Dalam konteks demokrasi lokal, pendidikan politik memiliki fungsi penting dalam membangun partisipasi politik masyarakat yang lebih rasional dan demokratis.⁷⁶ Oleh karena itu, pendidikan politik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas formal partai politik, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi politik yang bertujuan membangun budaya politik yang sehat di tengah masyarakat.

Peneliti melihat bahwa strategi pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen merupakan langkah preventif dalam mencegah praktik *Money Politics* sejak tahap awal pelaksanaan Pilkada. Meskipun demikian, efektivitas strategi tersebut masih dipengaruhi oleh budaya politik pragmatis yang berkembang di sebagian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa strategi yang dirumuskan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dilakukan melalui pendekatan pendidikan politik dan pembinaan internal partai. Strategi tersebut disusun sebagai langkah untuk menjaga citra politik partai dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam Pilkada.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang diterapkan oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik money politics tidak hanya

⁷⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 405.

dapat dipahami sebagai strategi organisasi politik, tetapi juga sebagai bentuk penerapan etika politik dalam kehidupan demokrasi. Upaya seperti pemberian pendidikan politik kepada masyarakat, pembinaan kader partai, serta pengawasan terhadap perilaku politik anggota partai menunjukkan adanya komitmen untuk membangun budaya politik yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

Menurut Franz Magnis-Suseno, etika politik menempatkan moralitas sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan politik. Politik tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh kekuasaan, tetapi harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta kepentingan umum. Oleh karena itu, praktik money politics merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika politik karena mengubah hubungan antara kandidat dan pemilih menjadi hubungan transaksional yang mengabaikan prinsip demokrasi dan kebebasan memilih.⁷⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen sejalan dengan prinsip-prinsip etika politik, khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, dan kapasitas calon, bukan karena imbalan materi. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya politik masyarakat yang masih permisif terhadap praktik money politics, persaingan politik yang ketat, serta masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap pemberian uang sebagai hal yang

⁷⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 35.

wajar dalam proses pemilihan kepala daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan money politics memerlukan komitmen bersama antara partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun budaya politik yang lebih berintegritas.

Selain faktor internal partai, proses perumusan strategi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik masyarakat Kabupaten Bireuen. Tingginya persaingan politik dalam Pilkada serta masih adanya praktik politik transaksional di tengah masyarakat menyebabkan partai politik perlu merumuskan strategi yang tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga bersifat edukatif. Dalam perspektif teori Peter Schroder, strategi politik yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya politik masyarakat.⁷⁸ Oleh karena itu, Partai Golkar Kabupaten Bireuen berupaya menyusun strategi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga pada penguatan legitimasi politik partai dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa strategi yang dirumuskan Partai Golkar Kabupaten Bireuen tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik elektoral semata, tetapi juga bertujuan menjaga legitimasi politik partai di tengah masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan partai menunjukkan adanya upaya untuk membangun citra partai sebagai organisasi politik yang mendukung pelaksanaan demokrasi yang bersih dan jujur. Selain itu, peneliti melihat bahwa perumusan strategi yang dilakukan partai masih menghadapi tantangan karena adanya budaya politik pragmatis yang berkembang di masyarakat.

⁷⁸ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 18.

Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan politik yang dilakukan partai belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada.

4.3. Pelaksanaan Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan Praktik *Money Politics*

Pelaksanaan strategi merupakan tahap implementasi dari kebijakan dan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, Partai Golkar Kabupaten Bireuen melakukan beberapa langkah untuk mencegah praktik *Money Politics*, seperti pengawasan terhadap kader dan tim pemenangan, sosialisasi politik, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat. Pelaksanaan strategi pencegahan praktik *Money Politics* dilakukan melalui berbagai pendekatan politik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Partai Golkar Kabupaten Bireuen tidak hanya melakukan pengawasan internal terhadap kader partai, tetapi juga melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui sosialisasi politik.⁷⁹

Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik pemberian uang dalam Pilkada. Selain itu, partai juga berupaya membangun komunikasi politik yang lebih terbuka dengan masyarakat agar masyarakat dapat memahami pentingnya memilih berdasarkan visi dan program kandidat.⁸⁰ Meskipun demikian, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama berkaitan dengan budaya politik pragmatis masyarakat dan tingginya persaingan politik antar kandidat dalam Pilkada.

⁷⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 173.

⁸⁰ Firman Noor, *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Obor Indonesia, 2015), hlm.97.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Raja, S.H selaku Anggota Badan Saksi Nasional Partai Golkar Kabupaten Bireuen pada tanggal 13 April 2026, beliau menjelaskan bahwa:

“Partai terus melakukan pengawasan terhadap kader dan tim politik selama proses Pilkada berlangsung. Kader partai selalu diarahkan agar menjalankan aktivitas politik sesuai aturan dan menjaga nama baik partai di tengah masyarakat.”⁸¹

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa pengawasan internal dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisir keterlibatan kader dalam praktik *Money Politics* selama proses Pilkada. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan T. Hasib Nailulsyah, S.Pd selaku Anggota AMPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen pada tanggal 14 April 2026, beliau menjelaskan bahwa:

“Pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting dilakukan agar masyarakat memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan program kerja, bukan karena adanya pemberian uang atau materi tertentu.”⁸²

Menurut beliau, masyarakat perlu diberikan kesadaran politik agar tidak mudah dipengaruhi praktik *Money Politics* dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Mursyid, S.Pd selaku Calon DPRK Dapil II Kuala Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 April 2026, beliau menjelaskan bahwa:

“Praktik Money Politics masih sulit dipisahkan dari kontestasi politik lokal karena persaingan politik yang cukup tinggi serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah.”⁸³

⁸¹ Wawancara dengan Muhammad Raja, S.H., Anggota BSNPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen,, 12 April 2026.

⁸² Wawancara dengan T. Hasib Nailulsyah, S.Pd. Anggota AMPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen, 14 April 2026

⁸³ Wawancara dengan Mursyid, S.Pd selaku Calon DPRK Dapil II Kuala Kabupaten Bireuen, 6 April 2026

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa pelaksanaan strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural dilakukan melalui pengawasan internal partai, sedangkan pendekatan kultural dilakukan melalui pendidikan politik dan komunikasi politik kepada masyarakat.

Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, pelaksanaan strategi tersebut menunjukkan adanya implementasi strategi politik melalui pemanfaatan sumber daya organisasi dan komunikasi politik kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan strategi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih adanya masyarakat yang memandang praktik *Money Politics* sebagai sesuatu yang wajar dalam proses Pilkada.

3.3.1. Komunikasi Politik Partai Golkar kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik *Money Politics*, komunikasi politik menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen. Komunikasi politik dilakukan untuk membangun hubungan politik antara partai dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi dalam Pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Raja, S.H selaku anggota BSNPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen, dijelaskan bahwa komunikasi politik kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan langsung, sosialisasi politik, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan kader partai. Selain itu, T.

Hasib Nailulsyah, S.Pd selaku anggota AMPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen menjelaskan bahwa komunikasi politik dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik pemberian uang dalam Pilkada. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi politik memiliki peran penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

Melalui komunikasi politik yang baik, partai politik dapat menyampaikan nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara lebih rasional.⁸⁴ Dalam konteks penelitian ini, komunikasi politik yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menjadi bagian dari strategi partai dalam mencegah praktik *Money Politics* pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.⁸⁵

3.3.2. Pendidikan Politik Partai Golkar kepada Masyarakat

Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi penting partai politik dalam sistem demokrasi. Dalam konteks penelitian ini, Partai Golkar Kabupaten Bireuen berupaya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai langkah untuk mencegah praktik *Money Politics* pada pelaksanaan Pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen, dijelaskan bahwa pendidikan politik dilakukan melalui sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih berdasarkan visi dan program kandidat, bukan karena pemberian uang atau materi tertentu. Selain itu, Mursyid, S.Pd selaku calon DPRK

⁸⁴

Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach* (Boston: Little Brown, 1966), hlm. 81.

⁸⁵ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 167.

Dapil II Kuala Kabupaten Bireuen menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran politik masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik *Money Politics* masih sulit dihilangkan dalam Pilkada.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi juga membangun budaya politik yang demokratis dan berintegritas.⁸⁶ Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu strategi penting yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam upaya mencegah praktik *Money Politics* pada Pilkada Tahun 2024.⁸⁷

4.4. Evaluasi Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan Praktik Money Politics

Evaluasi strategi merupakan tahap penilaian terhadap efektivitas strategi yang telah dilaksanakan. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen mampu mencegah praktik *Money Politics* pada Pilkada.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun partai telah melakukan berbagai upaya pencegahan, praktik *Money Politics* masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat yang masih menganggap pemberian materi sebagai hal yang wajar dalam proses pemilihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah,

⁸⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 410.

⁸⁷ Firman Noor, *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Obor Indonesia, 2015), hlm. 101.

S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen, beliau menjelaskan bahwa:

“Partai terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan politik selama Pilkada berlangsung. Pendidikan politik dan pengawasan terhadap kader terus dilakukan agar praktik Money Politics dapat diminimalisir dalam proses politik.”⁸⁸

Menurut beliau, praktik *Money Politics* masih sulit dihilangkan karena dipengaruhi budaya politik masyarakat dan tingginya persaingan politik dalam Pilkada. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Husni Algifahri selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024 Kabupaten Bireuen pada tanggal 18 April 2026, beliau menjelaskan bahwa:

“Praktik Money Politics masih sering ditemukan di masyarakat karena sebagian masyarakat menganggap pemberian uang dalam Pilkada sebagai sesuatu yang biasa.”⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik *Money Politics* dalam kontestasi politik lokal. Hal tersebut disebabkan karena praktik politik uang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor partai politik, tetapi juga dipengaruhi budaya politik pragmatis masyarakat dan tingginya biaya politik dalam Pilkada. Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, evaluasi strategi penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas strategi yang telah diterapkan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut.

⁸⁸ H. Yusri Abdullah, wawancara, 6 April 2026.

⁸⁹ Wawancara dengan Husni Algifahri, masyarakat Kabupaten Bireuen, di Bireuen, 18 April 2026.

Dengan demikian, pencegahan praktik *Money Politics* tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan internal partai, tetapi juga memerlukan kerja sama antara partai politik, masyarakat, dan penyelenggara pemilu dalam membangun budaya politik yang demokratis. Peneliti melihat bahwa evaluasi strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menjadi langkah penting dalam memperbaiki pelaksanaan strategi politik partai pada Pilkada berikutnya.

Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa partai menyadari masih adanya berbagai hambatan dalam upaya pencegahan praktik *Money Politics* di tengah masyarakat. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa keberhasilan strategi pencegahan praktik *Money Politics* tidak hanya bergantung pada partai politik, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik masyarakat dan efektivitas pengawasan demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara partai politik, masyarakat, dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menciptakan demokrasi yang bersih dan berintegritas.

4.5. Kendala Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam Mencegah Praktik *Money Politics*

Dalam upaya mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah, Partai Golkar Kabupaten Bireuen menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kendala tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan strategi politik yang telah dirumuskan oleh partai.

Praktik *Money Politics* merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan perilaku kandidat atau partai politik, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat, kondisi ekonomi, serta pola

persaingan politik dalam Pilkada. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang dilakukan partai politik sering kali menghadapi hambatan dalam implementasinya di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa praktik *Money Politics* dalam Pilkada tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat menyebabkan praktik politik uang masih sulit dipisahkan dari kontestasi politik lokal. Selain itu, lemahnya kesadaran politik masyarakat juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan partai politik. Dalam kondisi tersebut, praktik *Money Politics* masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh sebagian masyarakat sehingga upaya pencegahannya memerlukan proses yang berkelanjutan.

Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, hambatan dalam pelaksanaan strategi politik merupakan bagian dari dinamika politik yang harus dihadapi organisasi politik dalam mencapai tujuan politik tertentu. Oleh karena itu, strategi politik yang efektif memerlukan kemampuan organisasi dalam memahami kondisi sosial dan budaya politik masyarakat..

3.5.1. Budaya Politik Masyarakat

Salah satu kendala utama dalam mencegah praktik *Money Politics* adalah budaya politik masyarakat yang masih permisif terhadap pemberian uang atau materi dalam proses pemilihan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pemberian uang dari calon kepala daerah merupakan hal yang wajar dan telah menjadi bagian dari tradisi politik menjelang pemilu maupun Pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Husni Algifahri selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024 Kabupaten Bireuen, beliau menjelaskan bahwa:

“Sebagian masyarakat masih menganggap pemberian uang dalam Pilkada sebagai hal biasa. Bahkan ada masyarakat yang merasa kecewa apabila tidak mendapatkan uang atau bantuan dari kandidat politik menjelang pemilihan. Kondisi ini menyebabkan praktik Money Politics masih sering terjadi di tengah masyarakat karena sebagian masyarakat menganggap pemberian tersebut sebagai bentuk perhatian kandidat kepada masyarakat. Selain itu, masih ada masyarakat yang memilih kandidat bukan berdasarkan visi dan program kerja, tetapi berdasarkan siapa yang memberikan bantuan atau uang kepada mereka.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *Money Politics* dalam pelaksanaan Pilkada masih dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat yang cenderung permisif terhadap pemberian uang atau materi tertentu. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pemberian uang dalam proses politik merupakan hal yang wajar dan telah menjadi bagian dari kebiasaan politik menjelang pemilu maupun Pilkada. Kemudian hal ini juga dapat dipahami bahwa praktik *Money Politics* dalam Pilkada tidak hanya dipengaruhi oleh kandidat politik, tetapi juga berkaitan dengan budaya politik masyarakat yang masih bersifat pragmatis. Sebagian masyarakat masih memandang pemberian uang dalam Pilkada sebagai sesuatu yang lumrah dan menjadi bagian dari kebiasaan politik lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat mengenai pentingnya memilih berdasarkan kualitas kandidat masih perlu ditingkatkan.⁹¹ Budaya politik pragmatis tersebut menyebabkan proses demokrasi berjalan secara

⁹⁰ Husni Algifahri, wawancara, 6 April 2026.

⁹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 191.

transaksional. Dalam kondisi demikian, masyarakat cenderung menilai kandidat berdasarkan keuntungan material yang diterima dibandingkan visi, program, dan kapasitas kepemimpinan kandidat. Oleh karena itu, pendidikan politik kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah praktik *Money Politics* pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bireuen.⁹²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *Money Politics* tidak hanya dipengaruhi oleh kandidat politik atau partai politik, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat sebagai pemilih dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Dalam perspektif budaya politik, masyarakat yang terbiasa dengan praktik politik transaksional cenderung menempatkan proses politik sebagai hubungan pertukaran kepentingan material dibandingkan sebagai proses demokrasi yang didasarkan pada visi, program, dan kapasitas kandidat.⁹³

Selain itu, peneliti melihat bahwa budaya politik pragmatis yang berkembang di sebagian masyarakat menyebabkan upaya pencegahan praktik *Money Politics* menjadi lebih sulit dilakukan. Meskipun partai politik telah melakukan pendidikan politik dan pengawasan internal, praktik politik uang masih sering ditemukan karena adanya penerimaan sosial dari sebagian masyarakat terhadap praktik tersebut. Dalam konteks demokrasi lokal, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat masih menjadi tantangan penting dalam menciptakan Pilkada yang jujur dan demokratis. Oleh karena itu, pencegahan

⁹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 418.

⁹³ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture* (Princeton: Princeton University Press, 1963), hlm. 15.

praktik *Money Politics* tidak dapat dilakukan hanya melalui pengawasan partai politik dan lembaga pemilu, tetapi juga memerlukan perubahan budaya politik masyarakat secara bertahap melalui pendidikan politik yang berkelanjutan.⁹⁴

Peneliti juga melihat bahwa budaya politik masyarakat di Kabupaten Bireuen masih dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kedekatan emosional antara kandidat dengan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pemberian bantuan atau uang oleh kandidat sering kali dianggap sebagai bentuk perhatian politik kepada masyarakat, bukan sebagai pelanggaran demokrasi. Kondisi tersebut menyebabkan batas antara bantuan sosial, pendekatan politik, dan praktik *Money Politics* menjadi sulit dibedakan oleh sebagian masyarakat. Akibatnya, praktik politik uang masih memiliki ruang dalam pelaksanaan Pilkada meskipun secara normatif bertentangan dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Oleh karena itu, perubahan budaya politik masyarakat memerlukan proses yang panjang dan berkelanjutan melalui pendidikan politik, peningkatan kesadaran demokrasi, serta penguatan pengawasan terhadap praktik politik transaksional dalam Pilkada. Dalam perspektif teori pencegahan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya preventif melalui pendidikan politik masih memerlukan proses yang panjang untuk membangun budaya politik yang demokratis dan rasional di tengah masyarakat.

3.5.2. Faktor Ekonomi Masyarakat

Selain faktor budaya politik dan persaingan politik, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi maraknya praktik

⁹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 191.

Money Politics. Sebagian masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah cenderung lebih mudah menerima pemberian materi dari kandidat karena dianggap dapat membantu kebutuhan ekonomi mereka dalam jangka pendek.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik *Money Politics* masih sulit dihilangkan dalam pelaksanaan Pilkada. Sebagian masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah cenderung lebih mudah menerima pemberian uang atau bantuan dari kandidat politik karena dianggap dapat membantu kebutuhan ekonomi mereka dalam jangka pendek. Berdasarkan hasil wawancara dengan Husni Algifahri selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024 Kabupaten Bireuen, beliau menjelaskan bahwa:

“Kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi terjadinya praktik Money Politics. Ada masyarakat yang menerima uang dari kandidat karena merasa kondisi ekonomi mereka sulit, sehingga bantuan tersebut dianggap dapat membantu kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi seperti itu, sebagian masyarakat akhirnya lebih memilih kandidat yang memberikan bantuan secara langsung dibandingkan melihat program kerja kandidat.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa faktor ekonomi masyarakat memiliki pengaruh terhadap perilaku politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan sebagian masyarakat lebih mudah menerima praktik politik uang karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Faktor ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu penyebab masih terjadinya praktik *Money Politics* dalam Pilkada. Kondisi ekonomi yang kurang

⁹⁵ Husni Algifahri, wawancara, 6 April 2026.

stabil menyebabkan sebagian masyarakat lebih mudah menerima pemberian uang atau bantuan materi dari kandidat politik. Dalam situasi tersebut, kebutuhan ekonomi jangka pendek sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan pertimbangan terhadap kualitas demokrasi.⁹⁶ Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang relatif rendah juga dimanfaatkan oleh sebagian aktor politik untuk memperoleh dukungan secara instan melalui pendekatan material. Praktik tersebut menunjukkan bahwa persoalan *Money Politics* tidak hanya berkaitan dengan perilaku politik kandidat, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam demokrasi lokal.⁹⁷

Dalam perspektif teori patronase politik, praktik *Money Politics* sering muncul dalam kondisi masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap elite politik atau kandidat tertentu.⁹⁸ Dalam kondisi tersebut, hubungan politik tidak lagi didasarkan pada kualitas demokrasi dan kapasitas kandidat, tetapi lebih dipengaruhi oleh hubungan pertukaran bantuan ekonomi dan dukungan politik.

Peneliti melihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Bireuen menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik *Money Politics* oleh Partai Golkar Kabupaten Bireuen. Meskipun partai telah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, faktor kebutuhan ekonomi masih

⁹⁶ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hlm. 66.

⁹⁷ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 205.

⁹⁸ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), hlm. 93.

menyebabkan sebagian masyarakat bersikap pragmatis dalam menentukan pilihan politik.

Selain itu, tingginya biaya hidup dan keterbatasan ekonomi masyarakat menyebabkan pemberian uang atau bantuan dari kandidat sering dipandang sebagai kesempatan memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek. Akibatnya, praktik *Money Politics* masih memiliki ruang dalam pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal. Oleh karena itu, pencegahan praktik *Money Politics* tidak hanya memerlukan pengawasan politik dan pendidikan demokrasi, tetapi juga memerlukan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh praktik politik transaksional dalam proses demokrasi.⁹⁹

Kondisi tersebut menyebabkan praktik *Money Politics* sulit dihilangkan secara cepat, karena masyarakat terkadang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi sesaat dibandingkan mempertimbangkan kualitas dan kapasitas calon pemimpin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* tidak hanya berasal dari internal partai, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang dilakukan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

3.5.3. Tingginya Persaingan Politik

Kendala lain yang dihadapi Partai Golkar Kabupaten Bireuen adalah tingginya persaingan politik dalam pelaksanaan Pilkada. Persaingan antar kandidat

⁹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 195.

yang ketat sering kali mendorong munculnya praktik-praktik politik yang tidak sehat, termasuk *Money Politics*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Raja, S.H selaku Anggota BSNPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen, diketahui bahwa kondisi persaingan politik di lapangan cukup tinggi.

*“Dalam praktik di lapangan, persaingan politik memang cukup ketat. Namun demikian, kami tetap berupaya mengikuti arahan partai untuk tidak melakukan politik uang.”*¹⁰⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kompetisi politik yang tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi partai dalam menjaga komitmen kader dan tim pemenangan agar tetap menjalankan politik yang bersih. Tingginya persaingan politik dalam Pilkada menyebabkan setiap kandidat berupaya memperoleh dukungan masyarakat dengan berbagai cara. Dalam kondisi tersebut, praktik *Money Politics* sering dipandang sebagai strategi instan untuk meningkatkan elektabilitas politik di masyarakat.¹⁰¹

Persaingan politik yang ketat juga menyebabkan biaya politik dalam Pilkada menjadi semakin tinggi. Kandidat politik tidak hanya harus membangun popularitas dan jaringan politik, tetapi juga harus menghadapi tekanan politik dari kandidat lain yang menggunakan pendekatan material kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam menerapkan strategi pencegahan praktik *Money Politics* secara optimal di tingkat lokal.

¹⁰⁰ Muhammad Raja, S.H., wawancara, 12 April 2026.

¹⁰¹ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), hlm. 92.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tingginya persaingan politik dalam pelaksanaan Pilkada menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik *Money Politics* masih sulit dicegah. Persaingan antar kandidat yang ketat menyebabkan munculnya berbagai strategi politik untuk memperoleh dukungan masyarakat secara cepat, termasuk melalui pendekatan politik transaksional.

Dalam pelaksanaan demokrasi lokal, persaingan politik yang tinggi sering kali menyebabkan kandidat politik lebih berorientasi pada kemenangan politik dibandingkan penguatan kualitas demokrasi. Kondisi tersebut menyebabkan praktik *Money Politics* masih digunakan sebagai salah satu cara untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat dalam Pilkada.¹⁰²

Peneliti melihat bahwa tingginya kompetisi politik di Kabupaten Bireuen menyebabkan partai politik menghadapi tantangan besar dalam menjaga komitmen kader dan tim pemenangan agar tetap menjalankan politik yang bersih dan demokratis. Dalam kondisi persaingan politik yang ketat, tekanan untuk memperoleh dukungan suara masyarakat sering kali menyebabkan munculnya praktik-praktik politik yang tidak sehat.

Dalam perspektif teori strategi politik, tingginya kompetisi politik dapat memengaruhi efektivitas strategi yang telah dirumuskan partai. Semakin tinggi tingkat persaingan politik, maka semakin besar pula potensi munculnya praktik politik transaksional sebagai cara instan untuk memperoleh dukungan suara masyarakat.

¹⁰² Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 212.

Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, persaingan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang memengaruhi efektivitas strategi politik organisasi.¹⁰³ Semakin tinggi tingkat persaingan politik, maka semakin besar pula tantangan yang dihadapi partai politik dalam mempertahankan legitimasi politik dan menjalankan strategi politik secara ideal.

Selain itu, tingginya persaingan politik juga menyebabkan meningkatnya biaya politik dalam pelaksanaan Pilkada. Kandidat politik sering kali harus mengeluarkan biaya besar untuk kegiatan kampanye, mobilisasi massa, dan pendekatan politik kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat mendorong munculnya praktik *Money Politics* sebagai cara instan untuk memperoleh dukungan suara masyarakat.

Peneliti juga melihat bahwa tingginya persaingan politik di tingkat lokal menyebabkan pengawasan terhadap praktik politik uang menjadi lebih sulit dilakukan. Banyaknya aktivitas politik yang berlangsung selama masa kampanye menyebabkan partai politik dan lembaga pengawas pemilu menghadapi keterbatasan dalam mengontrol seluruh aktivitas politik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari partai politik, kandidat, dan masyarakat untuk menjaga pelaksanaan Pilkada agar tetap berjalan secara jujur, adil, dan demokratis meskipun berada dalam situasi persaingan politik yang tinggi.

3.5.4. Keterbatasan Pengawasan di Lapangan

Kendala berikutnya adalah keterbatasan pengawasan terhadap seluruh aktivitas politik yang berlangsung selama proses Pilkada. Luasnya wilayah

¹⁰³ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 24.

Kabupaten Bireuen serta banyaknya aktivitas kampanye menyebabkan pengawasan secara menyeluruh sulit dilakukan oleh partai politik.

Keterbatasan pengawasan di lapangan menjadi salah satu kendala utama dalam mencegah praktik *Money Politics* pada pelaksanaan Pilkada. Luasnya wilayah pengawasan dan keterbatasan jumlah pengawas menyebabkan praktik politik uang masih sulit dikontrol secara maksimal.¹⁰⁴ Selain itu, praktik *Money Politics* sering dilakukan secara tertutup melalui jaringan tim sukses dan tokoh masyarakat tertentu sehingga sulit dibuktikan secara hukum. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap praktik politik uang memerlukan kerja sama antara partai politik, masyarakat, dan lembaga pengawas pemilu agar proses demokrasi dapat berjalan secara jujur dan adil.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan pengawasan di lapangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* selama pelaksanaan Pilkada. Luasnya wilayah Kabupaten Bireuen serta tingginya aktivitas politik menjelang pemilihan menyebabkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas kader dan tim politik tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, banyaknya kegiatan kampanye dan mobilisasi politik di tingkat desa juga menyebabkan partai politik mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas politik berjalan sesuai dengan aturan organisasi dan prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Kondisi tersebut menyebabkan praktik politik uang

¹⁰⁴ Bawaslu Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilu dan Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Bawaslu RI, 2022), hlm. 24.

¹⁰⁵ Didik Supriyanto, *Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 70.

masih memiliki peluang untuk terjadi di lapangan meskipun partai telah melakukan pengawasan internal terhadap kader dan tim pemenangan. Meskipun Partai Golkar Kabupaten Bireuen telah melakukan pengawasan internal terhadap kader dan tim pemenangan, namun pengawasan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh aktivitas politik yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Raja, S.H selaku Anggota Badan Saksi Nasional Partai Golkar Kabupaten Bireuen, diketahui bahwa pengawasan terhadap aktivitas politik di lapangan tidak selalu berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki partai.

“Pengawasan memang terus dilakukan oleh partai, tetapi dalam praktiknya cukup sulit mengawasi seluruh aktivitas politik di lapangan karena wilayah yang luas dan banyaknya aktivitas kampanye selama Pilkada berlangsung.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keterbatasan pengawasan menjadi tantangan dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik *Money Politics*. Pengawasan internal partai belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh aktivitas politik yang terjadi selama masa Pilkada. Dalam perspektif teori pencegahan politik, pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran demokrasi, termasuk praktik *Money Politics*.¹⁰⁷ Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang bagi kandidat maupun tim politik untuk melakukan praktik politik transaksional dalam proses Pilkada.

Peneliti melihat bahwa keterbatasan pengawasan di lapangan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal partai, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas

¹⁰⁶ Muhammad Raja, S.H., wawancara, 12 April 2026.

¹⁰⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 201.

dinamika politik lokal dalam pelaksanaan Pilkada. Tingginya aktivitas politik, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta luasnya wilayah pengawasan menyebabkan partai politik mengalami kesulitan dalam mengontrol seluruh aktivitas politik yang berlangsung di masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan praktik *Money Politics* memerlukan kerja sama antara partai politik, lembaga pengawas pemilu, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengawasan politik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kondisi ini menyebabkan partai mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa seluruh kader benar-benar menjalankan kegiatan politik sesuai dengan aturan organisasi dan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Dalam perspektif teori pencegahan, lemahnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran politik, termasuk praktik *Money Politics*. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara partai politik, penyelenggara pemilu, aparat pengawas, dan masyarakat dalam menciptakan pengawasan politik yang lebih efektif.

3.5.5. Bentuk Pengawasan dan Intervensi Partai Golkar terhadap Kader

Sebagai bentuk implementasi dari strategi pencegahan *Money Politics*, Partai Golkar Kabupaten Bireuen tidak hanya mengandalkan arahan kebijakan secara verbal, tetapi juga melakukan pengawasan dan intervensi secara langsung terhadap kader dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pengawasan yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan komunikasi politik dan pembinaan internal terhadap kader

partai. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga perilaku politik kader agar tetap sesuai dengan aturan organisasi serta prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Dalam pelaksanaan Pilkada, pengawasan internal partai menjadi penting karena kader dan tim politik merupakan aktor yang terlibat langsung dalam aktivitas politik di lapangan. Oleh karena itu, partai politik perlu memastikan bahwa seluruh kader memahami batasan-batasan politik serta tidak terlibat dalam praktik *Money Politics* selama proses Pilkada berlangsung.

Dalam pelaksanaan Pilkada, pengawasan internal partai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga disiplin kader dan mencegah keterlibatan kader dalam praktik *Money Politics*. Partai Golkar Kabupaten Bireuen berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kader agar tetap menjalankan aktivitas politik sesuai dengan aturan partai dan prinsip demokrasi yang sehat.¹⁰⁸ Pengawasan tersebut dilakukan melalui komunikasi internal partai serta pemberian arahan kepada kader agar tidak melakukan praktik-praktik politik yang dapat merusak citra partai di masyarakat. Selain itu, partai juga menekankan pentingnya menjaga integritas politik dalam pelaksanaan Pilkada sebagai bagian dari tanggung jawab politik kepada masyarakat.¹⁰⁹

Pertama, pengawasan dilakukan melalui rapat koordinasi internal partai yang diselenggarakan secara berkala, baik sebelum maupun selama masa kampanye berlangsung. Dalam rapat tersebut, pengurus DPD menyampaikan arahan tegas agar seluruh kader dan tim pemenangan tidak melibatkan diri dalam praktik

¹⁰⁸ Firman Noor, *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Obor Indonesia, 2015), hlm. 102.

¹⁰⁹ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 28.

pemberian uang atau materi kepada pemilih. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen:

"Partai Golkar lebih mengutamakan pendekatan program kerja dan komunikasi politik kepada masyarakat."¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Partai Golkar Kabupaten Bireuen berupaya membangun pendekatan politik yang lebih berorientasi pada komunikasi politik dan penyampaian program kerja kepada masyarakat dibandingkan pendekatan politik transaksional. Peneliti melihat bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi partai dalam menjaga citra politik dan meningkatkan legitimasi partai di tengah masyarakat. Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, pengawasan internal dan pembinaan organisasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan strategi politik organisasi.¹¹¹ Selain itu, pengawasan internal terhadap kader juga menunjukkan adanya upaya partai untuk membangun disiplin organisasi dalam menghadapi dinamika politik lokal selama pelaksanaan Pilkada.

Kedua, intervensi partai terhadap kader dilakukan melalui penerapan aturan internal yang mewajibkan kader menjalankan kegiatan politik secara etis. Kader yang terbukti melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi organisasi sesuai mekanisme yang berlaku dalam internal partai. Langkah ini merupakan bentuk pengendalian perilaku kader agar sesuai dengan komitmen partai dalam menjaga integritas demokrasi lokal.

¹¹⁰ H. Yusri Abdullah, wawancara, 6 April 2026.

¹¹¹ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 27.

Ketiga, partai juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas kampanye kader di lapangan melalui koordinasi dengan struktur organisasi di tingkat kecamatan. Meskipun pengawasan ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bireuen, upaya tersebut menunjukkan adanya mekanisme kontrol internal yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dalam proses Pilkada. Dalam konteks demokrasi lokal, pengawasan internal partai memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada. Pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan mencegah pelanggaran politik, tetapi juga bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai lembaga demokrasi.

Peneliti melihat bahwa bentuk pengawasan dan intervensi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya kesadaran partai mengenai pentingnya menjaga integritas politik dalam pelaksanaan Pilkada. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan di lapangan dan tingginya persaingan politik antar kandidat. Oleh karena itu, pengawasan internal partai perlu dilakukan secara berkelanjutan dan didukung dengan pendidikan politik kepada kader agar strategi pencegahan praktik *Money Politics* dapat berjalan lebih efektif dalam pelaksanaan demokrasi lokal.¹¹²

Dengan demikian, bentuk pengawasan dan intervensi Partai Golkar Kabupaten Bireuen terhadap kader mencakup tiga aspek utama, yaitu pengawasan melalui rapat koordinasi berkala, penerapan aturan internal dengan mekanisme

¹¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.421.

sanksi, serta pemantauan aktivitas kampanye di lapangan. Ketiga bentuk pengawasan ini merupakan wujud konkret dari pelaksanaan strategi struktural partai dalam upaya mencegah praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah.

3.5.6. Dampak *Money Politics* terhadap Demokrasi Lokal

Praktik *Money Politics* memberikan dampak yang cukup besar terhadap kualitas pelaksanaan demokrasi lokal di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan hasil penelitian, praktik politik uang menyebabkan proses demokrasi tidak berjalan secara ideal karena pilihan politik masyarakat sering dipengaruhi oleh pemberian uang atau materi tertentu dibandingkan visi dan program kandidat politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Husni Algifahri selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Bireuen Tahun 2024, ia menjelaskan bahwa praktik pemberian uang dalam Pilkada masih sering ditemukan di tengah masyarakat. Menurutnya, sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai hal yang biasa dalam proses politik lokal karena sudah sering terjadi pada setiap pelaksanaan pemilihan umum maupun Pilkada. Selain itu, Muhammad Raja, S.H selaku anggota BSNPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen menjelaskan bahwa praktik *Money Politics* memberikan dampak negatif terhadap kualitas demokrasi karena masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan kualitas kandidat, melainkan berdasarkan keuntungan material yang diterima selama proses Pilkada berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik politik uang menyebabkan demokrasi berjalan secara transaksional. Dalam kondisi tersebut, masyarakat cenderung memandang politik sebagai sarana memperoleh

keuntungan material jangka pendek dibandingkan sebagai proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang berkualitas.¹¹³ Selain itu, praktik *Money Politics* juga menyebabkan meningkatnya biaya politik dalam Pilkada. Tingginya biaya politik tersebut berpotensi mendorong munculnya praktik korupsi politik setelah kandidat terpilih karena adanya upaya untuk mengembalikan modal politik yang telah digunakan selama proses pemilihan berlangsung.¹¹⁴

Oleh karena itu, praktik *Money Politics* menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan demokrasi lokal di Kabupaten Bireuen. Pencegahan praktik tersebut tidak hanya memerlukan pengawasan hukum, tetapi juga memerlukan pendidikan politik dan penguatan kesadaran demokrasi masyarakat secara berkelanjutan.¹¹⁵

4.6. Analisis Strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam Pencegahan Praktik

3.6.1. *Money Politics* Berdasarkan Teori Peter Schroder

Strategi politik merupakan langkah yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam penelitian ini, teori strategi politik Peter Schroder digunakan sebagai *grand theory* untuk menganalisis strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam pencegahan praktik *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah.¹¹⁶

¹¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.417.

¹¹⁴ Didik Supriyanto, *Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 64.

¹¹⁵ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hlm. 73.

¹¹⁶ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung, 2009), hlm. 15.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

3.6.2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahap awal dalam menentukan arah dan langkah politik organisasi. Dalam konteks penelitian ini, Partai Golkar Kabupaten Bireuen melakukan perumusan strategi dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya politik masyarakat di Kabupaten Bireuen.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 April 2026, beliau menjelaskan bahwa:

“Partai terus memberikan arahan kepada kader agar menjalankan proses politik secara sehat dan tidak melakukan praktik Money Politics dalam Pilkada.”¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa pendidikan politik dan pembinaan internal partai menjadi bagian dari strategi yang dirumuskan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics*.

Berdasarkan hasil penelitian, perumusan strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya upaya partai dalam menyesuaikan strategi politik dengan kondisi sosial dan budaya politik masyarakat di Kabupaten Bireuen. Strategi tersebut dirumuskan tidak hanya untuk kepentingan politik

¹¹⁷ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung, 2009), hlm. 12.

¹¹⁸ H. Yusri Abdullah, wawancara, 6 April 2026.

elektoral, tetapi juga untuk menjaga legitimasi politik partai di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap praktik *Money Politics* dalam Pilkada. Peneliti melihat bahwa langkah pendidikan politik yang dilakukan partai merupakan bentuk strategi preventif untuk meminimalisir praktik *Money Politics* dalam pelaksanaan Pilkada.

Selain itu, strategi tersebut juga menunjukkan adanya upaya partai dalam membangun citra politik yang lebih demokratis dan berintegritas di tengah masyarakat. Dalam perspektif teori Peter Schroder, strategi politik tidak hanya berorientasi pada kemenangan politik, tetapi juga memperhatikan legitimasi politik dan citra partai di tengah masyarakat.¹¹⁹ Oleh karena itu, langkah pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya upaya partai dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa proses perumusan strategi masih menghadapi kendala karena budaya politik pragmatis masyarakat yang masih cukup kuat dalam pelaksanaan Pilkada.

3.6.3. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi merupakan tahap implementasi dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya.¹²⁰ Dalam tahap ini, Partai Golkar Kabupaten Bireuen melaksanakan strategi melalui pengawasan internal partai dan pendidikan politik kepada masyarakat.

¹¹⁹Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung, 2009), hlm. 15.

¹²⁰ Ibid, hlm. 18.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Raja, S.H selaku Anggota Badan Saksi Nasional Partai Golkar Kabupaten Bireuen, beliau menjelaskan bahwa:

“Partai terus melakukan pengawasan terhadap kader dan tim politik selama proses Pilkada berlangsung agar tidak terlibat dalam praktik Money Politics.”¹²¹

Selain itu, T. Hasib Nailulsyah, S.Pd selaku Anggota AMPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen, menjelaskan bahwa:

“Pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh pemberian uang dalam Pilkada.”¹²²

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa pelaksanaan strategi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya kombinasi antara pendekatan struktural dan pendekatan kultural dalam mencegah praktik *Money Politics*. Pendekatan struktural dilakukan melalui pengawasan internal terhadap kader dan tim politik, sedangkan pendekatan kultural dilakukan melalui pendidikan politik dan komunikasi politik kepada masyarakat.

Peneliti melihat bahwa pelaksanaan strategi tersebut menunjukkan adanya kesadaran partai politik mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi lokal melalui pendekatan politik yang lebih edukatif. Meskipun demikian, efektivitas

¹²¹ Muhammad Raja, S.H., wawancara, 12 April 2026.

¹²² T. Hasib Nailulsyah, S.Pd. wawancara, 14 April 2026.

strategi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya politik pragmatis masyarakat, faktor ekonomi masyarakat, dan tingginya persaingan politik dalam Pilkada.

Pendekatan struktural dilakukan melalui pengawasan internal partai terhadap kader dan tim politik. Sementara itu, pendekatan kultural dilakukan melalui pendidikan politik dan komunikasi politik kepada masyarakat.

Dalam perspektif teori Peter Schroder, pelaksanaan strategi politik memerlukan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya politik dan komunikasi politik secara efektif.¹²³ Dalam hal ini, Partai Golkar Kabupaten Bireuen berupaya menjalankan strategi melalui pemanfaatan struktur organisasi partai dan komunikasi politik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan strategi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih adanya praktik *Money Politics* di tengah masyarakat.

3.6.4. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap penilaian terhadap efektivitas strategi yang telah dilakukan oleh organisasi politik.¹²⁴ Dalam penelitian ini, evaluasi strategi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan strategi Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen, beliau menjelaskan bahwa:

*“Partai terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan politik selama Pilkada agar strategi yang dilakukan dapat berjalan lebih baik.”*¹²⁵

¹²³ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung, 2009), hlm. 20.

¹²⁴ Ibid, hlm. 22.

¹²⁵ H. Yusri Abdullah, wawancara, 6 April 2026.

Selain itu, Husni Algifahri selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024 Kabupaten Bireuen, menjelaskan bahwa:

“Praktik Money Politics masih sering ditemukan karena sebagian masyarakat masih menganggap pemberian uang dalam Pilkada sebagai hal yang biasa.”¹²⁶

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik *Money Politics* dalam kontestasi politik lokal. Evaluasi strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa strategi pencegahan praktik *Money Politics* belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun partai telah melakukan pendidikan politik, pengawasan kader, dan komunikasi politik kepada masyarakat, praktik politik uang masih ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal. Dalam perspektif teori Peter Schroder, evaluasi strategi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi politik yang telah diterapkan organisasi politik.¹²⁷ Evaluasi strategi juga bertujuan mengidentifikasi hambatan dan kelemahan dalam pelaksanaan strategi agar organisasi politik dapat melakukan perbaikan strategi pada pelaksanaan politik berikutnya.

Peneliti melihat bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan strategi pencegahan praktik *Money Politics* di Kabupaten Bireuen berasal dari faktor eksternal, seperti budaya politik masyarakat yang masih permisif terhadap politik

¹²⁶ Husni Algifahri, wawancara, 6 April 2026.

¹²⁷ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 22.

uang, kondisi ekonomi masyarakat, serta tingginya persaingan politik antar kandidat dalam Pilkada.

Oleh karena itu, strategi pencegahan praktik *Money Politics* memerlukan kerja sama yang lebih luas antara partai politik, masyarakat, penyelenggara pemilu, dan aparat pengawas dalam menciptakan demokrasi lokal yang jujur, adil, dan berintegritas. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya politik pragmatis masyarakat, tingginya persaingan politik, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi, strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya politik masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, serta tingginya persaingan politik dalam Pilkada.¹²⁸ Meskipun demikian, strategi yang dilakukan partai menunjukkan adanya upaya untuk membangun proses demokrasi yang lebih sehat melalui pendidikan politik, komunikasi politik, dan pengawasan kader partai. Oleh karena itu, evaluasi strategi menjadi penting agar partai politik dapat memperbaiki kelemahan strategi dan meningkatkan efektivitas pencegahan praktik *Money Politics* pada pelaksanaan Pilkada berikutnya.¹²⁹

4.7. Analisis Hasil Pelaksanaan Strategi Partai Golkar dalam Pencegahan *Money Politics*

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik *Money Politics* telah menunjukkan

¹²⁸ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), hlm. 101.

¹²⁹ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 31.

adanya upaya partai dalam menjaga kualitas pelaksanaan demokrasi lokal. Strategi tersebut dilakukan melalui pendidikan politik, pengawasan kader, serta komunikasi politik kepada masyarakat selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Yusri Abdullah, S.Sos selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen, dijelaskan bahwa partai terus berupaya memberikan arahan kepada kader agar tidak terlibat dalam praktik *Money Politics* serta menjaga citra partai dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu, T. Hasib Nailulsyah, S.Pd selaku anggota AMPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen menjelaskan bahwa pendidikan politik kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi oleh praktik politik uang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen memiliki pengaruh terhadap upaya pencegahan praktik *Money Politics* di tingkat lokal. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya politik pragmatis masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, serta tingginya persaingan politik dalam Pilkada.¹³⁰

Dalam perspektif teori strategi politik Peter Schroder, efektivitas strategi politik dapat dilihat dari kemampuan organisasi politik dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.¹³¹ Dalam konteks penelitian ini, strategi Partai

¹³⁰ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), hlm. 101.

¹³¹ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2009), hlm. 31.

Golkar Kabupaten Bireuen dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal karena praktik *Money Politics* masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Meskipun demikian, strategi yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya komitmen partai dalam membangun proses demokrasi yang lebih sehat melalui pendidikan politik, pengawasan internal partai, dan penguatan komunikasi politik kepada masyarakat.¹³²



¹³² Firman Noor, *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Obor Indonesia, 2015), hlm. 109.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Partai Politik Golongan Karya dalam Pencegahan Praktik Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen dalam mencegah praktik money politics telah dilaksanakan melalui tiga tahapan strategi sebagaimana dikemukakan oleh Peter Schroder, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Pada tahap perumusan strategi, Partai Golkar menyusun langkah-langkah pencegahan melalui koordinasi internal dan penyusunan program pendidikan politik. Pada tahap pelaksanaan, partai melakukan sosialisasi, pembinaan kader, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Pilkada yang jujur dan bebas dari praktik money politics. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, Partai Golkar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta mengevaluasi berbagai kendala yang muncul selama proses Pilkada. Strategi tersebut menunjukkan adanya komitmen Partai Golkar untuk mendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih berintegritas di Kabupaten Bireuen.
2. Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen masih menghadapi beberapa kendala dalam mencegah praktik money politics, di antaranya masih adanya budaya politik transaksional di sebagian masyarakat, rendahnya kesadaran politik sebagian pemilih, tingginya persaingan antar peserta Pilkada, serta

keterbatasan pengawasan terhadap seluruh aktivitas politik di lapangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan money politics tidak hanya memerlukan komitmen partai politik, tetapi juga dukungan dari penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung secara jujur, adil, demokratis, dan berintegritas.



5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Partai Golkar Kabupaten Bireuen

Partai Golkar Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memperkuat pendidikan politik secara berkelanjutan kepada kader dan masyarakat agar kesadaran politik masyarakat semakin meningkat. Selain itu, pengawasan internal terhadap kader dan tim pemenangan perlu ditingkatkan dengan mekanisme yang lebih tegas dan konsisten guna meminimalisir praktik *Money Politics* dalam setiap pelaksanaan Pilkada.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik *Money Politics*. Partisipasi masyarakat yang rasional dan berbasis pada program serta kapasitas kandidat sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

3. Bagi Penyelenggara dan Pengawas Pemilu

Penyelenggara dan pengawas pemilu diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik *Money Politics*. Sinergi antara lembaga pengawas, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan proses demokrasi yang jujur dan adil.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam cakupan wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan

dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas serta pendekatan yang lebih beragam agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Bapak H. Yusri Abdullah, S.Sos (Selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Bireuen) dan Bersama Bapak Mursyid, S.Pd (Selaku Calon DPRK Dapil II Kuala, Kab. Bireuen)





Wawancara dengan Bapak Muhammad Raja, S.H
(Selaku Anggota BSNPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen)



Wawancara Bersama Bapak T. Hasib Nailulsyah, S.Pd
(Selaku Anggota AMPG Partai Golkar Kabupaten Bireuen)



Wawancara Bersama Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024
Salah satunya Bapak Husni Algifari (Masyarakat yang berpartisipasi dalam
Pilkada 2024 Kabupaten Bireuen)

